



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN RUANG PUBLIK YANG DEMOKRATIS SEBAGAI  
UPAYA PENGEMBANGAN SIKAP DEMOKRATIS**

**Studi Kasus: Ruang Publik RUSUNA Harum Tebet Barat dan  
Ruang Publik RUSUNA Bidaracina**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Arsitektur dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik,  
Universitas Indonesia**

**GALIH NURLAELA KUSTIAWATI**

**0706269142**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPARTEMEN ARSITEKTUR**

**DEPOK**

**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Galih Nurlaela Kustiawati**

**NPM : 0706269142**

**Tanda tangan :** 

**Tanggal : 1 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Galih Nurlaela Kustiawati  
NPM : 0706269142  
Program Studi : Arsitektur  
Judul Skripsi : Peran Ruang Publik Yang Demokratis Sebagai  
Upaya Pengembangan Sikap Demokratis  
(Studi Kasus : Ruang Publik RUSUNA Harum  
Tebet Barat dan Ruang Publik RUSUNA  
Bidaracina)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ir. Azrar Hadi, Ph.D

()

Penguji : Prof. Ir. Triatno Judho Hardjoko, M.Sc., Ph.D.

()

Penguji : Ir. Toga H. Panjaitan, A.A.Grad.Dipl.

()

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 1 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Ir. Azrar Hadi, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan saya selama penyusunan skripsi ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya, Engkus Kustiwa dan Ilah, kedua kakak saya, Gugum Gumilar dan Titis Kus Mawati, dan keponakan saya tersayang, Fatimah Fauzia Almahira yang telah memberikan banyak dukungan baik secara material maupun moril.
3. Ibu Ir. Wanda Lalita Basuki, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu saya dari awal hingga akhir perkuliahan.
4. Bapak Prof. Ir. Triatno Judho Hardjoko, M.Sc., Ph.D. dan Bapak Ir. Toga H. Panjaitan, A.A.Grad.Dipl., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberi banyak masukan dalam skripsi ini.
5. Ibu Hani, selaku Ketua Kordinator Kebersihan PPRS dan Ibu Tini, selaku Ketua Ibu PKK RUSUNA Harum Tebet Barat yang telah banyak membantu saya selama survei.
6. Pak Imam, selaku Sekretaris Umum RUSUNA Bidaracina yang telah banyak membantu saya selama survei.
7. Teman-teman satu bimbingan skripsi, puspa dan novi yang sama-sama saling mengingatkan dan menguatkan dalam proses penulisan skripsi.

Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan yang saling memotivasi.

8. Mia, Wulan, Evita, Citra, Metha, Rizka, Tuti, Reni, Lintar, Salim. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan di arsitektur maupun organisasi dari awal sampai akhir kuliah selama 4 tahun.
9. Kak Ayu Arsitektur 2004, kak Karin Arsitektur 2005, dan kak Ayu Arsitektur 2006, senior arsitektur yang sudah menjadi tempat curhat skripsi. Terima kasih banyak sudah memberikan saran-saran yang bermanfaat dan rekomendasi situs ebook langka.
10. Teman-teman FUSI, Rohis Arsitektur, Salam UI, Engineering Fair, Arsitektur dan Planologi Islam, dan teman-teman lembaga dan kepanitiaan lainnya yang sudah menyemangati saya selama skripsi dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan diri selama kuliah di Teknik.
11. Serta teman-teman lainnya yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perubahan dalam diri saya.

Semoga skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Kritik, saran, atau pertanyaan mengenai skripsi ini dapat disampaikan melalui email: [sagittus\\_scylla@yahoo.com](mailto:sagittus_scylla@yahoo.com).

Depok, 1 Juli 2011



Galih Nurlaela Kustiawati

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Nurlaela Kustiawati

NPM : 0706269142

Program Studi : Arsitektur

Departemen : Arsitektur

Fakultas : Teknik

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peran Ruang Publik Yang Demokratis Sebagai Upaya Pengembangan  
Sikap Demokratis

Studi Kasus : Ruang Publik RUSUNA Harum Tebet Barat dan Ruang Publik  
RUSUNA Bidaracina

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 1 Juli 2011

Yang menyatakan



(Galih Nurlaela Kustiawati)

## ABSTRAK

Nama : Galih Nurlaela Kustiawati  
Program Studi: Arsitektur  
Judul : Peran Ruang Publik Yang Demokratis Sebagai Upaya  
Pengembangan Sikap Demokratis  
Studi Kasus : Ruang Publik RUSUNA Harum Tebet Barat dan  
Ruang Publik RUSUNA Bidaracina

Ruang publik mencerminkan identitas suatu masyarakat. Masyarakat Indonesia menganut demokrasi sehingga seharusnya nilai-nilai demokrasi tercermin dalam ruang publiknya. Ruang publik yang demokratis mencerminkan identitas masyarakat karena fisiknya mampu berperan dalam mengupayakan pengembangan sikap demokratis. Masyarakat mengalami pembangunan karakter dengan adanya interaksi sosial di ruang publik sehingga dimensi fisik ruang publik sangatlah penting dalam menanamkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme (Abdillah, 1999; dalam Rosyada, dkk, 2005).

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah wujud fisik ruang publik demokratis yang bisa berperan mengupayakan pengembangan sikap demokratis. Skripsi ini mengambil studi kasusnya di ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat dan ruang publik RUSUNA Bidaracina dengan kelas sosial ekonomi yang berbeda. Dengan perbedaan kelas sosial ekonomi masyarakat tersebut, maka bisa diketahui juga kaitan antara wujud fisik ruang publik yang demokratis dengan kelas sosial ekonomi masyarakat. Lingkungan rumah tinggal memiliki potensi menumbuhkan nilai-nilai demokrasi secara alami dalam kesehariannya.

Berdasarkan hasil tinjauan teori dan analisis studi kasus, wujud fisik ruang publik yang demokratis difokuskan pada dimensi keterbukaan dan dimensi kepemilikan. Dimensi keterbukaan menekankan pada aksesibilitas yang tinggi sedangkan dimensi kepemilikan menekankan pada batas teritorial fisiknya. Setelah dianalisis, penulis menemukan ruang pada perpotongan jalan memiliki potensi besar dalam penciptaan ruang publik yang demokratis sebagai upaya pengembangan sikap demokratis.

Kata kunci : Ruang publik yang demokratis, pengembangan sikap demokratis, RUSUNA

## ABSTRACT

Name : Galih Nurlaela Kustiawati  
Study Program : Architecture  
Title : The Role of Democratic Public Space As An Effort for  
Developing of Democratic Attitude  
Case Study: RUSUNA Harum Tebet Barat's Public Space and  
RUSUNA Bidaracina's Public Space

Public space is reflecting the community identity. Indonesian community is embracing democracy so that democracy values should be reflected into public space. Democratic public space is reflecting community identity because of it's physics have a role to strive democratic attitude development. Community have been develop their character with social interaction in public space so that physical public space is being important to develop democracy principles. Democracy principles are equation, freedom, and pruralism (Abdillah, 1999; into Rosyada, dkk, 2005).

The aim of this writing is to find what kind of the physical public space which have a role as an effort for developing of democratic attitude. The case studies are RUSUNA Harum Tebet Barat's public space and RUSUNA Bidaracina's public space. Both of them have different level of social economic so can find the relationship between physical public space and community's social economic level. Housing environment have potency to develop democracy values naturally.

Based on the theory and it's application on case studies, it can be concluded that physical democratic public space focused on two dimension. There are openness and ownership. Openness dimension is emphasizing high accessibility and ownership dimension is emphasizing physical territory. The writer found space in street intersection have big potency to create democratic public space as a democratic attitude development.

Key words: Democratic public space, democratic attitude development, RUSUNA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR ISTILAH .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Manfaat Penulisan .....	4
1.5 Metode Penulisan .....	4
1.6 Urutan Penulisan .....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
2.1 Demokrasi .....	6
2.1.1 Definisi Demokrasi .....	6
2.1.2 Demokrasi dalam Sistem Sosial .....	7
2.1.3 Demokrasi dan Kelas Sosial Ekonomi Masyarakat.....	9
2.1.4 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Barat .....	10
2.1.5 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia .....	11
2.2 Ruang Publik .....	12
2.2.1 Definisi Publik .....	12
2.2.2 Definisi Ruang Publik .....	13
2.2.3 Klasifikasi Ruang Publik .....	15
2.3 Ruang Publik yang Demokratis.....	17
2.3.1 Definisi Ruang Publik yang Demokratis .....	17
2.3.2 Kriteria Ruang Publik yang Demokratis .....	18
2.3.3 Perspektif Penciptaan Ruang Publik yang Demokratis .....	21
2.4 Ruang Publik yang Demokratis di RUSUNA .....	23
2.4.1 Definisi RUSUNA .....	23
2.4.2 Ruang publik RUSUNA.....	24
2.4.3 Ruang publik RUSUNA yang Demokratis.....	26
<b>BAB 3. STUDI KASUS DAN ANALISIS.....</b>	<b>27</b>
3.1 RUSUNA Harum Tebet Barat.....	27
3.1.1 Deskripsi Umum RUSUNA Harum Tebet Barat.....	27
3.1.2 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Penghuni RUSUNA Harum Tebet Barat.....	28
3.1.3 Pandangan Beberapa Penghuni RUSUNA Harum Tebet Barat Mengenai Demokrasi dan Implementasinya.....	30

3.1.4 Ruang Publik di RUSUNA Harum Tebet Barat.....	32
3.1.4.1 Ruang Publik yang Terencana RUSUNA Harum Tebet Barat.....	33
3.1.4.2 Ruang Publik yang Tidak Terencana RUSUNA Harum Tebet Barat.....	39
3.1.5 Kesimpulan Analisis Ruang Publik RUSUNA Harum Tebet Barat.....	41
3.1.6 Potensi Organisasi Ruang Publik RUSUNA Harum Tebet Barat yang Demokratis.....	43
3.2 RUSUNA Bidaracina .....	46
3.2.1 Deskripsi Umum RUSUNA Bidaracina.....	46
3.2.2 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Penghuni RUSUNA Bidaracina.....	46
3.2.3 Pandangan Beberapa Penghuni RUSUNA Bidaracina Mengenai Demokrasi dan Implementasinya.....	48
3.2.4 Ruang Publik di RUSUNA Bidaracina.....	49
3.2.4.1 Ruang Publik yang Terencana RUSUNA Bidaracina.....	50
3.2.4.2 Ruang Publik yang Tidak Terencana RUSUNA Bidaracina.....	55
3.2.5 Kesimpulan Analisis Ruang Publik RUSUNA Bidaracina.....	58
3.2.6 Potensi Organisasi Ruang Publik RUSUNA Bidaracina yang Demokratis.....	60
3.3 Perbandingan Ruang Publik RUSUNA Harum Tebet Barat dan Bidaracina.....	62
<b>BAB 4. KESIMPULAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR ISTILAH

Azas mayoritas	Dasar pegangan sistem demokrasi yang menerapkan persamaan jumlah terbanyak sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.
Demokrasi konstitusional	Sistem demokrasi dimana peran pemerintah pasif, yaitu hanya menjadi wasit atau pelaksana keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen.
Demokrasi langsung	Demokrasi dimana rakyat turut serta secara langsung mengambil keputusan politik yang menyangkut kepentingan warga negara
Demokrasi Pancasila	Demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
Demokrasi terpimpin	Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun pada implementasinya di Indonesia melenceng karena kepemimpinan terpusat di presiden.
Konfigurasi alur	Pembentukan alur
<i>Magna Charta</i>	Magna Carta (Latin untuk "Piagam Besar") adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tahun 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut.
Masyarakat madani	Elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi, dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan, dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter.
Organisasi ruang linier	Organisasi yang terdiri dari sederetan ruang yang berulang, serupa dalam hal ukuran, bentuk, dan fungsi
Prulalisme	Keadaan masyarakat yang majemuk baik yang bersangkutan dengan sistem sosial ataupun sistem politik.
Responsif	Responsif dalam arti ruang publik harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas.
Sikap demokratis	Sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokratis yaitu kritis, bebas menyuarakan pendapat, dan berpartisipasi

- aktif.
- Sense of community* Perasaan memiliki, persahabatan, identitas, dsb, yang dirasakan dalam konteks kelompok fungsional maupun secara geografis.
- Welfare state* Welfarestate atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Konsep dasar demokrasi, Abraham Lincoln.....	6
Gambar 2.2.	Skema ruang publik dan privat.....	13
Gambar 2.3.	Pola-pola pembentukan ruang publik.....	15
Gambar 2.4.	Taman sebagai ruang publik yang direncanakan.....	16
Gambar 2.5.	Tangga sebagai ruang publik yang tidak direncanakan.....	16
Gambar 2.6.	Ruang Publik sebagai Sarana Interaksi Sosial yang Menguatkan Keanggotaan dan Identitas di Keseharian.....	18
Gambar 2.7.	Ruang Publik yang memunculkan kekuatan demokrasi pada saat aksi demonstrasi dalam menyuarakan pendapat masyarakat.....	18
Gambar 2.8.	Tata letak akses masuk suatu ruang.....	19
Gambar 2.9.	Perpotongan jalan yang potensial ramai oleh aktivitas publik.....	20
Gambar 2.10.	Bundaran HI berada di ruang perpotongan jalan biasa digunakan untuk demonstrasi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.....	20
Gambar 2.11.	Tempat bermain anak-anak di RUSUNA.....	24
Gambar 2.12.	Ruang serbaguna di RUSUNA.....	24
Gambar 2.13.	Organisasi linier yang umum di RUSUNA.....	25
Gambar 2.14.	Ruang-ruang publik di organisasi linier.....	25
Gambar 3.1.	Kondisi Umum RUSUNA Harum Tebet Barat.....	27
Gambar 3.2.	Persebaran komunitas di ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat .....	30
Gambar 3.3.	Kondisi RUSUNA yang bersih dan indah. Jarang yang menjemur pakaian sembarangan.....	31
Gambar 3.4.	Gambar distribusi ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat ....	32
Gambar 3.5.	Distribusi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat.	33
Gambar 3.6.	Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat 1 .....	34
Gambar 3.7.	Sarana parkir mobil sepanjang lapangan yang ada di depan sampai belakang RUSUNA .....	34
Gambar 3.8.	Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat 2 .....	35
Gambar 3.9.	Kondisi koridor lantai dasar dimana banyak motor di parkir.....	35
Gambar 3.10.	Alih fungsi koridor lantai dasar menjadi ruang interaksi sosial penghuni. ....	35
Gambar 3.11.	Ruang serbaguna. Aula memiliki tipikal ruang yang sama dengan ruang serbaguna.....	36
Gambar 3.12.	Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat 3 .....	37
Gambar 3.13.	Kegiatan senam ibu-ibu PKK di lapangan futsal setiap 2 kali seminggu di sore hari.....	37
Gambar 3.14.	Kegiatan bermain futsal anak-anak setiap sore hari.....	37

Gambar 3.15. Taman bermain anak-anak yang jarang digunakan lagi .....	37
Gambar 3.16. Lapangan badminton yang sudah beralih fungsi menjadi lapangan parkir.....	38
Gambar 3.17. Anak-anak yang mendapat sebagian kecil lahan lapangan badminton untuk bermain.....	38
Gambar 3.18. Pola tata letak ruang publik tidak terencana RUSUNA Harum Tebet Barat .....	39
Gambar 3.19. Ruang publik tidak terencana dekat akses masuk blok.....	39
Gambar 3.20. Ruang publik tidak terencana yang ada di perpotongan jalan.....	40
Gambar 3.21. Ruang publik tidak terencana di bawah tangga dekat akses masuk	40
Gambar 3.22. Analisis organisasi ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat terkait konfigurasi alur .....	41
Gambar 3.23. Sirkulasi penghuni dan akses-akses masuk ke RUSUNA Harum Tebet Barat .....	43
Gambar 3. 24. Titik-titik keramaian ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat .....	44
Gambar 3.25. Zoning potensi ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat yang demokratis .....	44
Gambar 3.26. Kondisi Umum RUSUNA Bidaracina .....	46
Gambar 3.27. Persebaran komunitas di ruang publik RUSUNA Bidaracina .....	48
Gambar 3.28. Distribusi ruang publik RUSUNA Bidaracina.....	50
Gambar 3.29. Distribusi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina.....	51
Gambar 3.30. Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina 1.....	51
Gambar 3.31. Sarana parkir .....	52
Gambar 3.32. Taman bermain anak-anak .....	52
Gambar 3.33. Mesjid dan aula serbaguna .....	52
Gambar 3.34. Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina 2.....	53
Gambar 3.35. Ruang publik sebagai ruang interaksi sosial di koridor lantai dasar .....	53
Gambar 3.36. Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina 3.....	54
Gambar 3.37. Lapangan badminton RUSUNA Bidaracina .....	54
Gambar 3.38. Organisasi ruang publik tidak terencana RUSUNA Bidaracina 1.....	55
Gambar 3.39. Ruang publik tidak terencana di lahan kosong dekat akses masuk alternatif dan akses masuk blok.....	55
Gambar 3.40. Ruang publik tidak terencana di akses masuk.....	56
Gambar 3. 41 Organisasi ruang publik tidak terencana RUSUNA Bidaracina 2.....	56
Gambar 3.42. Ruang publik tidak terencana di jalan koridor .....	57
Gambar 3.43. Ruang publik tidak terencana di koridor penghubung sub blok.....	57
Gambar 3.44. Analisis organisasi ruang publik RUSUNA Bidaracina terkait konfigurasi alur .....	58
Gambar 3.45. Titik-titik keramaian di ruang publik RUSUNA Bidaracina.....	60
Gambar 3.46. Sirkulasi penghuni dan akses-akses masuk ke RUSUNA Bidaracina .....	60
Gambar 3.47. Zoning potensi ruang publik yang demokratis di RUSUNA Bidaracina .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sejarah perkembangan demokrasi di barat.....	10
Tabel 2.2. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia.....	11
Tabel 3.1. Komunitas sosial di RUSUNA Harum Tebet Barat.....	29
Tabel 3.2. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat menurut teori Goodsell.....	34
Tabel 3.3. Analisis organisasi ruang publik tidak terencana menurut teori Goodsell .....	39
Tabel 3.4. Kesimpulan analisis organisasi ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat menurut teori Goodsell.....	42
Tabel 3.5. Komunitas sosial di RUSUNA Bidaracina.....	47
Tabel 3.6. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell.....	51
Tabel 3.7. Analisis organisasi ruang publik tidak terencana RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell.....	55
Tabel 3.8. Kesimpulan analisis organisasi ruang publik tidak terencana menurut teori Goodsell.....	59
Tabel 3.9. Perbandingan ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat dan Bidaracina.....	63

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Sistem pemerintahan demokrasi ini kerap kali diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sebagai suatu sistem pemerintahan negara maka nilai-nilai demokrasi tersebut sudah seharusnya tercermin juga dalam perilaku masyarakatnya, sehingga demokrasi bukan hanya sebagai sistem kenegaraan namun berkembang sampai ke sistem sosial masyarakat.

Sebagai negara demokrasi sudah selayaknya mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam setiap aspek, salah satunya adalah lingkungan rumah tinggal yang berpotensi mengembangkan masyarakat yang demokratis. Hal ini dikarenakan pendidikan pertama yang didapat oleh setiap manusia berasal dari lingkungan rumah tinggalnya. Masyarakat demokratis dicirikan dengan masyarakat terbuka, kritis, bebas menyuarakan pendapat, dan berpartisipasi aktif. Interaksi sosial berperan penting dalam menguatkan ciri khas masyarakat tersebut sehingga menuntut adanya ruang publik sebagai wadah utama pengembangan sikap demokratis. Masyarakat demokratis memegang teguh prinsip demokrasi yang terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme (Abdillah, 1999; dalam Rosyada, dkk, 2005). Menurut Jurgen Habermas (1989) ruang publik merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan dimana masyarakat bertemu, ngobrol, berdiskusi. Dalam keadaan masyarakat bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis maka akan terbentuk apa yang disebut dengan masyarakat demokratis. Dengan ini ruang publik secara fisik pun mampu berperan dalam pengembangan sikap demokratis. Karena pengolahan fisik ruang publik turut mempengaruhi gambaran kehidupan manusia di dalamnya.

Azas mayoritas yang dipegang oleh demokrasi mengindikasikan masyarakat miskin sebagai kaum mayoritas di Indonesia dengan persentase sebesar 60%<sup>1</sup> seharusnya menjadi fokus utama negara untuk bisa mewujudkan

<sup>1</sup> Vivi Elfira, Pemanfaatan Ruang Bersama di Dalam Bangunan Rumah Susun bagi Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Skripsi tidak diterbitkan, 1997, 3



masyarakat Indonesia yang sejahtera. Salah satunya dengan mewujudkan perumahan yang layak untuk masyarakat miskin melalui megaproyek Rumah Susun Sederhana (RUSUNA). RUSUNA memiliki ruang publiknya sendiri yang sarat akan nilai-nilai sosial, politik, budaya dll yang bisa menguatkan identitas ruang publik tersebut. Stephen Carr, dkk (1992) melihat ruang publik sebagai ruang milik bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang terbuka, tempat masyarakat melakukan aktivitas pribadi dan kelompok.<sup>2</sup>

Dalam negara Indonesia sebagai negara demokrasi, nilai-nilai demokrasi seharusnya bisa tercermin dalam keseharian bersama masyarakatnya tanpa memandang kelas sosial ekonominya. Walaupun menurut penelitian di Afrika kemiskinan memiliki komitmen sikap yang kurang terhadap demokrasi sehingga sikap-sikap masyarakat miskin kurang mencerminkan masyarakat demokratis dalam kesehariannya.<sup>3</sup> Ruang publik RUSUNA menjadi salah satu perumahan yang bisa diambil contoh mengenai kondisi demokratisnya. Apakah benar masyarakat miskin memiliki komitmen sikap yang kurang terhadap demokrasi? Hal ini bisa tercermin dalam keseharian bersama mereka di ruang publik sebagai wadah utama yang menunjang aktivitas bersama masyarakatnya. Ruang publik sebagai wadah aktivitas sosial masyarakat demokratis berpeluang untuk menguatkan identitas demokrasi dalam suatu wujud fisik ruang publik.

Mengingat pada penulisan skripsi yang ada sebelumnya sudah banyak menulis mengenai ruang publik di RUSUNA, namun belum ada yang mengaitkannya dengan demokrasi. Penulis berkeinginan untuk menulis mengenai fisik ruang publik yang demokratis di RUSUNA. Dari tulisan ini, diharapkan bisa

<sup>2</sup> Dini Tri Haryanti, *Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Smpang Lima Semarang*, 2008, 41. 9 Juni 2011.

< [http://eprints.undip.ac.id/17085/1/DINI\\_TRI\\_HARYANTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17085/1/DINI_TRI_HARYANTI.pdf) >

<sup>3</sup> Michael Bratton, *Afrobarometer Working Papers : Poor People and Democratic Citizenship in Africa*, South Africa: Afrobarometer, 2006, 21, 12 April 2011

< [www.afrobarometer.org](http://www.afrobarometer.org) >

mengetahui seperti apakah dimensi fisik ruang publik yang demokratis itu?, bagaimana cara menciptakan ruang publik yang demokratis yang bisa berperan mengembangkan sikap demokratis?, dan adakah kaitan ruang publik yang demokratis dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya?

## 1.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang diangkat dalam penulisan ini adalah

“Seperti apakah dimensi fisik ruang publik yang demokratis sehingga bisa diupayakan berperan dalam pengembangan sikap demokratis?”

Dari permasalahan utama tersebut diturunkan menjadi beberapa pertanyaan yaitu :

- Apa yang dimaksud dengan ruang publik yang demokratis?
- Apa saja kriteria fisik ruang publik yang demokratis dan bagaimana menciptakannya sehingga bisa berupaya mengembangkan sikap demokratis?
- Bagaimana kondisi demokrasi di ruang publik RUSUNA?
- Adakah kaitan ruang publik yang demokratis dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya?

Skripsi ini membatasi pembahasan pada peran ruang publik yang demokratis sebagai upaya pengembangan sikap demokratis. Dimulai dari penggalian arti demokrasi itu baik dari sistem kenegaraan maupun sistem sosial. Kemudian menggali definisi ruang publik itu sendiri dan mengkaitkannya dengan demokrasi. Setelah itu menggali apa sebenarnya ruang publik yang demokratis itu dari segi fisik dan bagaimana fisik ruang publik berperan mengembangkan sikap demokratis.

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui wujud fisik ruang publik demokratis yang berperan dalam mengembangkan sikap demokratis dan bagaimana cara menciptakannya.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan perancang ruang publik terutama di RUSUNA sehingga kelak bisa merancang ruang publik yang demokratis. Sebagai negara demokrasi, nilai-nilai demokrasi bisa tercermin dalam suatu ruang publik yang bisa berperan sebagai pengembangan sikap demokratis. Dengan ini, nilai-nilai positif demokrasi tidak hanya terimplementasi di tataran politik saja namun bisa dirasakan di keseharian masyarakatnya yaitu di ruang publik.

#### **1.5. Metode Penulisan**

Penulisan skripsi ini merupakan penulisan dengan melakukan studi literatur tentang fisik ruang publik demokratis yang berperan sebagai upaya pengembangan sikap demokratis. Kemudian penulis melakukan studi kasus terhadap ruang publik Rumah Susun Sederhana (RUSUNA) di Jakarta yang menjadi ibu kota negara yaitu RUSUNA Harum Tebet Barat, Jakarta Selatan dan Bidaracina, Jakarta Timur. Pengamatan dilakukan dalam beberapa kali kunjungan ke ruang publik RUSUNA tersebut untuk mengambil informasi-informasi yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil foto ruang publik dan aktivitas sosial di RUSUNA juga wawancara ke pengelola, organisasi sosial, dan masyarakat yang ada di sana untuk mengetahui aktivitas sosial yang terjadi di ruang publik dan pengelolaannya sehari-hari.

#### **1.6. Urutan Penulisan**

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Teori

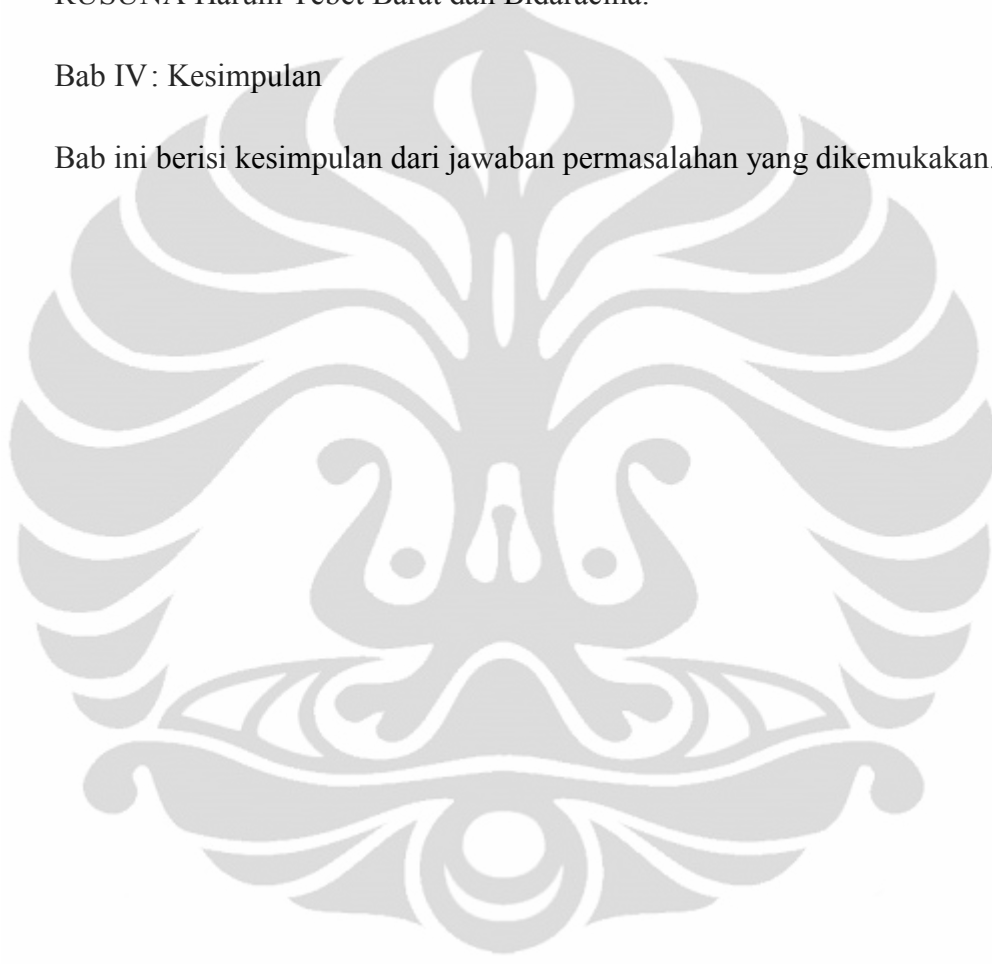
Bab ini berisi tinjauan teori yang menjadi dasar dari penulisan skripsi ini. Pembahasan dalam Bab II meliputi pembahasan demokrasi, ruang publik, ruang publik yang demokratis, ruang publik yang demokratis di RUSUNA.

### Bab III: Studi Kasus dan Analisis

Pembahasan dalam Bab III meliputi hasil studi kasus dan analisis ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat dan Bidaracina.

### Bab IV: Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang dikemukakan.

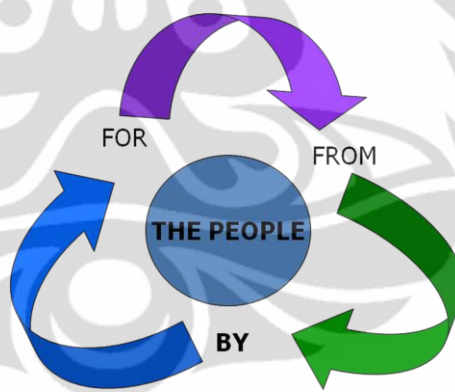


## BAB 2 TINJAUAN TEORI

### 2.1. Demokrasi

#### 2.1.1. Definisi Demokrasi

Definisi demokrasi bisa ditinjau secara etimologis dan bahasa. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>4</sup>



Gambar 2.1 Konsep dasar demokrasi, Abraham Lincoln  
Sumber : [www.fkh.unair.ac.id/materi/.../DEMOKRASI%20INDONESIA%201.ppt](http://www.fkh.unair.ac.id/materi/.../DEMOKRASI%20INDONESIA%201.ppt)

Demokrasi dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat diterima baik sebagai ide, norma, dan sistem sosial maupun sebagai wawasan, sikap, dan perilaku

---

<sup>4</sup> Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005,110

individual yg secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan (Ciced,1999; dalam Gustaf, dkk, 2011). Menurut Ciced (1999) demokrasi dipandang sbg konsep yg multidimensional yaitu :

1. filosofis : demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip
2. sosiologis : demokrasi sebagai sistem sosial
3. psikologis : demokrasi sebagai wawasan, sikap, dan perilaku dalam hidup bermasyarakat (Gustaf, dkk, 2011).

Demokrasi dalam sistem sosial merupakan pondasi dasar dalam mewujudkan keberhasilan demokrasi dalam sistem bernegara. Namun sayangnya selama ini demokrasi dalam sistem sosial kurang mendapatkan perhatian dibandingkan demokrasi dalam sistem bernegara. Rakyat merupakan penggerak utama sistem demokrasi sehingga keseharian bermasyarakatnya menjadi cermin dari demokrasi itu sendiri. Ketika demokrasi dijalankan dalam sistem kenegaraan yang begitu kompleks maka sudah bisa ditopang oleh kesiapan sistem sosial sehingga bisa meminimalisir adanya cacat demokrasi. Jika sistem kenegaraan dan sistem bermasyarakat dapat terintegrasi dengan baik maka bisa melahirkan negara yang sebenar-benarnya demokrasi.

### **2.1.2. Demokrasi dalam Sistem Sosial**

Demokrasi dalam sistem sosial merupakan keseharian masyarakat dalam bersosialisasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dalam kesehariannya. Menurut Meyer (2007, hlm.96) dalam teori demokrasi sosial masyarakat memiliki kebebasan individual namun di satu waktu juga mempertimbangkan apa yang harus dilakukan masyarakat sehingga bisa mendatangkan manfaat yang dijamin oleh haknya dalam kesehariannya. Prinsip-prinsip demokrasi yang terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme (Abdillah, 1999; dalam Rosyada, dkk, 2005, hlm 122) haruslah dipegang dalam keseharian masyarakat. Maka dari itu tidak ada lagi anggapan demokrasi hanya milik elit politik atau golongan tertentu saja karena demokrasi milik rakyat.

Nilai-nilai demokrasi tertanam dalam kehidupan bermasyarakat melalui pelibatan-pelibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kehidupan sosial masyarakat menjadi perwujudan konsep demokrasi secara nyata dalam pengaplikasian nilai-nilai demokrasi secara alami. Demokrasi memiliki aturan-aturan sosial yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang tertulis dalam undang-undang negara. Sehingga nilai-nilai demokrasi secara teratur dan terarah bisa terinternalisasi dalam kehidupan masyarakatnya. Yang mana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban warga negara sehingga masyarakat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab.

Menurut Gellner (n.d.) masyarakat madani (*civil society*) dan demokrasi merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan (Rosyada,dkk, 2005, hlm.119). Masyarakat madani (*civil society*) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis, dan berpartisipasi aktif serta masyarakat yang egaliter.<sup>5</sup> Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun negara demokrasi. Ciri-ciri yang ada dalam masyarakat madani mencerminkan karakter dari sistem demokrasi itu sendiri. Sedangkan karakter masyarakat demokratis itu sendiri yaitu antara lain sebagai berikut : memiliki rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, rasional, adil, dan jujur.<sup>6</sup> Selain itu masyarakat demokratis memiliki kebebasan dalam menyuarakan aspirasinya di ruang real maupun virtual. Ruang real seperti ruang publik yang digunakan sebagai sarana interaksi sosial masyarakat dimana banyak menyuarakan aspirasi mereka selama interaksi berlangsung. Namun seiring berkembangnya zaman ruang real bergeser ke ruang virtual sehingga masyarakat semakin bebas dan mudah menyuarakan aspirasinya melalui media online, jejaring sosial, blog, dll di internet.

Dengan adanya demokrasi dalam sistem sosial ini maka masyarakat

---

<sup>5</sup> *ibid.*,119

<sup>6</sup> *ibid.*,79

sesungguhnya diberikan hak yang sama untuk bisa mempelajari dan menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi tersebut yang bisa membantu perkembangan negara demokrasi.

### 2.1.3. Demokrasi dan Kelas Sosial Ekonomi Masyarakat

Aspek ekonomi dan politik memiliki potensi yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya. Hubungan antara perubahan sosial-ekonomi secara makro dan perubahan politik secara makro diikuti oleh perubahan mikro pada sikap, nilai, dan perilaku pada individu (Huntington, 1971; dalam Krishna, 2011, hlm.7). Seperti halnya demokrasi sebagai sistem politik juga turut mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku masyarakatnya.

Faktor kelas ekonomi menentukan perbedaan sikap, nilai, dan perilaku demokrasi pada kehidupan masyarakat sehari-harinya. Menurut penelitian di Afrika, kemiskinan memiliki komitmen sikap yang kurang terhadap demokrasi. Sehingga dalam keseharian sikap-sikap masyarakat miskin kurang mencerminkan masyarakat yang demokratis. Namun secara partisipasi politik masyarakat miskin memiliki respon yang cukup baik dalam pemilihan umum.<sup>7</sup> Hal ini membuktikan secara kenegaraan demokrasi mampu bekerja sesuai dengan teori yang ada namun demokrasi belum mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menyebabkan banyak negara penganut demokrasi belum berhasil melaksanakannya secara sempurna karena belum memiliki pondasi demokrasi dalam bermasyarakat.

Menurut Lipset (1994) akses pendidikan dan penyebaran norma dasar dari demokrasi sangat mempengaruhi kadar demokrasi dari masyarakatnya.<sup>8</sup> Dua hal ini yang sering dilupakan oleh beberapa negara demokrasi sehingga nilai-nilai demokrasi hanya bisa dirasakan berbagai pihak saja. Dalam hal ini masyarakat

---

<sup>7</sup> Michael Bratton, Afrobarometer Working Papers : *Poor People and Democratic Citizenship in Africa*, South Africa: Afrobarometer, 2006,21, 12 April 2011. < [www.afrobarometer.org](http://www.afrobarometer.org) >

<sup>8</sup> Anirudh Krishna, *Poverty, Participation, and Democracy*, Cambridge University Press, 12, 12 April 2011. <<http://www.thedivineconspiracy.org/Z52570.pdf>>



miskin yang sulit mengakses pendidikan ikut sulit merasakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya. Sangat disayangkan mengingat konsep dasar nilai-nilai demokrasi tidaklah memandang kelas sosial ekonomi karena semua masyarakat memiliki hak yang sama akan nilai-nilai demokrasi.

#### 2.1.4. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Barat

Tabel 2.1 Sejarah perkembangan demokrasi di barat

Sumber : Diolah dari buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani karangan Dede Rosyada, dkk tahun 2005.

No	Bentuk Demokrasi	Periode	Kondisi Demokrasi
1	Demokrasi langsung	Abad ke-6 SM – abad ke-4 SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.</li> <li>• hak demokrasi belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat.</li> </ul>
2	Demokrasi pada akhir abad pertengahan	Akhir abad pertengahan	Hak asasi manusia diperjuangkan melalui <i>Magna Charta</i> (Piagam Besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris.
3	Demokrasi konstitusional ( <i>konstitusionalisme</i> )	Abad ke-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemerintah hanya menjadi pelaksana sebagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen.</li> <li>• Menganut prinsip pluralis liberalis yang mendapat kecaman karena akses-akses dalam industrialisasi, sistem kapitalis, dan tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan yang merata.</li> </ul>
4	<i>welfare state</i> atau “Negara Hukum Material”	Tahun 1850an	Pemerintah membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan

Yunani Kuno merupakan tempat lahirnya demokrasi pertama kali antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 SM. Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bernegara di sana yang pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*). Perkembangan demokrasi di barat melalui 4 fase dengan bentuk demokrasi yang berbeda (Lihat Tabel 2.1). Sampai saat ini demokrasi perlahan tidak hanya dipandang penting bagi sistem kenegaraan namun sekarang ini sudah mulai berkembang di tataran sistem bermasyarakat.

Dalam perkembangan terakhir ,demokrasi ala *welfare state* juga mulai ditinjau ulang dan konsep demokrasi di Barat pun masih berjalan dan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Demokrasi yang berawal dari sistem kenegaraan ini perlahan-lahan berkembang ke tataran sosial masyarakatnya.

#### 2.1.5. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periode yaitu, periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode 1998-sekarang (Lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia

Sumber : Diolah dari buku Demokrasi,Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani karangan Dede Rosyada, dkk tahun 2005.

No	Bentuk Demokrasi	Periode	Kondisi Demokrasi
1	Demokrasi parlementer	Tahun 1945-1959	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokrasi tercermin dengan adanya dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li>• Sudah menerapkan pemilihan umum, dimana masyarakatnya mencerminkan prinsip demokrasi yaitu pluralisme</li> </ul>
2	Demokrasi terpimpin	Tahun 1959-1965	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerak masyarakat dibatasi oleh kepemimpinan presiden Soekarno yang otoriter.</li> </ul>

Tabel 2.2 Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia (sambungan)

No	Bentuk Demokrasi	Periode	Kondisi Demokrasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik.</li> </ul>
3	Demokrasi pancasila	Tahun 1965-1998	Secara konsep sudah mengedepankan kepentingan masyarakat di berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, politik, dll. Namun belum sampai ke tataran pelaksanaan sehingga belum terasa manfaatnya. Presiden Soeharto malah mempraktekkan demokrasi diktatorsip yang tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin.
4	Demokrasi dalam orde reformasi	Tahun 1998-sekarang	Masyarakat mendapatkan kebebasan untuk berpartisipasi di berbagai ranah. Hal ini ditandai dengan kebebasan pers, pencabutan UU politik yang tidak demokratis, kebebasan mendirikan partai politik dll.

Sampai saat ini Indonesia masih mencari jati diri demokrasi yang sesuai dengannya. Indonesia masih menitikberatkan perkembangan demokrasi dalam ranah politik saja sehingga prinsip-prinsip demokrasi kurang terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakatnya. Namun secara perlahan nilai-nilai demokrasi tertanam pada masyarakat Indonesia. Hal ini seringkali terlihat dalam pola interaksi sosial masyarakat dalam suatu ruang publik. Dimana keseharian mereka di ruang publik merupakan cermin dari demokrasi yang dianut suatu negara.

## 2.2. Ruang Publik

### 2.2.1. Definisi Publik

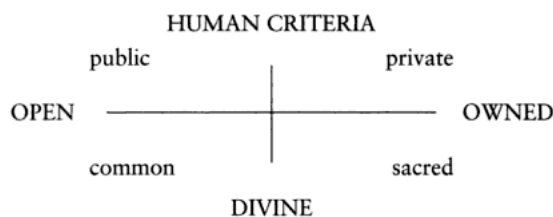
Menurut Arendt (1998, hlm.50) istilah publik ditandai oleh 2 kondisi yang saling terkait tapi tidak selalu bersamaan, yaitu:

- Semuanya nampak dimana bisa dilihat dan didengar semua orang.
- Menandakan dunianya itu sendiri, bersifat umum untuk semuanya dan berbeda dari tempat yang dimiliki secara pribadi. Publik bisa mengumpulkan banyak orang dan membuat mereka satu sama lain saling berbicara.

Untuk bisa memahami istilah publik maka perlu dipahami istilah sebaliknya yaitu privat. Privat erat kaitannya dengan kepemilikan individu terhadap sesuatu. Menurut Arendt (1998, hlm.71) sesuatu yang privat seringkali dibatasi oleh empat dinding yang menegaskan kepemilikan yang menyembunyikan sesuatu dari dunia publik secara umum. Sesuatu yang privat memiliki keterbatasan untuk bisa dilihat dan didengar oleh pihak tertentu.

### 2.2.2. Definisi Ruang Publik

Carr, dkk (1992) melihat ruang publik sebagai ruang milik bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang terbuka, tempat masyarakat melakukan aktivitas pribadi dan kelompok.<sup>9</sup> Carr (1922) menyatakan bahwa ruang publik setidaknya harus memenuhi tiga hal yaitu: responsif, demokratis dan bermakna. Responsif dalam arti ruang publik harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Sementara demokratis berarti ruang publik seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia. Dan terakhir bermakna yang berarti ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang dan dunia luas serta dengan konteks sosial (Syamsura, n.d.). Ruang publik bersifat terbuka dan tidak dimiliki secara individu namun dimiliki bersama sedangkan ruang privat bersifat



Gambar 2.2 Skema ruang publik dan privat.

Sumber : Buku Publik Space and Democracy karangan Marcel Henaff, tahun 2001

<sup>9</sup> D. Ary A. Syamsura, Ruang Publik bagi Publik, 9 Juni 2011.  
< [http://forumarsitekatam.blogspot.com/2008\\_02\\_10\\_archive.html](http://forumarsitekatam.blogspot.com/2008_02_10_archive.html)>

dibatasi dengan adanya kepemilikan individu didalamnya (Lihat Gambar 2.2). Menurut Jurgen Habermas (1989) ruang publik merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan dimana masyarakat bertemu, ngobrol, berdiskusi. Dalam keadaan masyarakat bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis maka akan terbentuk apa yang disebut dengan masyarakat madani.

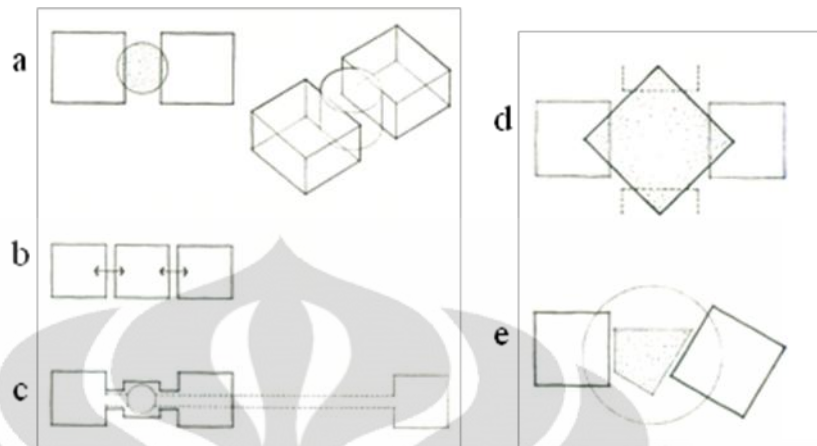
Marshal McLuhan (n.d.) menyatakan lingkungan manusia bisa menciptakan identitas individu dan sosial. Hal ini juga berlaku pada ruang publik yang bisa menciptakan identitas masyarakat demokrasi. Di ruang publik masyarakat menguatkan keanggotaan dan menggambarkan identitas.<sup>10</sup> Dengan ini maka ruang publik secara fisik turut mengembangkan sikap demokratis.

Ruang publik sebagai ruang perantara memiliki pola-pola pembentukan yang biasanya diapit oleh ruang-ruang disekitarnya sehingga menjaga keterhubungan ruang di sekitarnya, yaitu :<sup>11</sup> (Lihat Gambar 2.3)

- a. Ruang publik dapat berbeda dalam bentuk dan orientasi dari ruang lainnya untuk menunjukkan fungsinya.
- b. Ruang publik dapat setara dalam wujud, ukuran, dan membentuk serangkaian ruang linier.
- c. Ruang publik dapat berbentuk linier untuk menghubungkan kedua ruang yang berjarak atau menghubungkan seluruh rangkaian ruang-ruang yang tidak mempunyai hubungan satu sama lain.
- d. Ruang publik yang cukup besar dapat menjadi ruang yang dominan dalam hubungannya dengan ruang-ruang lain dan mampu mengorganisir sejumlah ruang yang terkait.
- e. Bentuk ruang publik dapat terjadi dengan sendirinya atau ditentukan oleh bentuk dan orientasi dari kedua ruang yang terkait.

<sup>10</sup> John Parkinson: *Holistic Democracy and Physical Public Space*, *British Journal of Political Science Conference*, London, 2006, 7, 27 Maret 2011. < <http://www.pdfqueen.com>>

<sup>11</sup> Diolah dari buku *Bentuk, Ruang, dan Tata* karangan Francis D.K. Ching, tahun 2000.



Gambar 2.3 Pola-pola pembentukan ruang publik  
 Sumber : Buku Bentuk, Ruang, dan Tataan karangan Francis D.K. Ching, tahun 2000.

### 2.2.3. Klasifikasi Ruang Publik

Ruang publik berdasarkan prosesnya terbagi menjadi dua<sup>12</sup>, yaitu :

- Ruang publik terencana

Ruang publik terencana yaitu ruang publik yang direncanakan oleh pemerintah dan arsitek untuk kepentingan umum atau pribadi yang dapat digunakan oleh umum. Seperti taman yang secara fungsi dan fisik sudah dirancang untuk interaksi sosial masyarakat. Untuk menciptakan ruang publik arsitek perlu mempelajari lebih dalam akan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya sehingga tercipta ruang publik yang demokratis. Penting bagi arsitek untuk bisa menumbuhkan *sense of community* pada ruang publik sehingga identitas masyarakat yang demokratis bisa tercermin di dalamnya. Dengan adanya *sense of community* pada ruang publik maka akan menumbuhkan rasa keanggotaan, pengaruh (penanaman nilai-nilai tertentu), pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan juga berbagi koneksi emosional antara masyarakat dan ruang publik.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Vivi Elfira, Pemanfaatan Ruang Bersama di Dalam Bangunan Rumah Susun bagi Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Skripsi tidak diterbitkan, 1997.

<sup>13</sup> Emily Talen, *The Problem with Community Planning*, *Journal of Planning Literature*, Illinois: Sage, 2000, 176. 19 April 2011. < <http://www.4shared.com>>

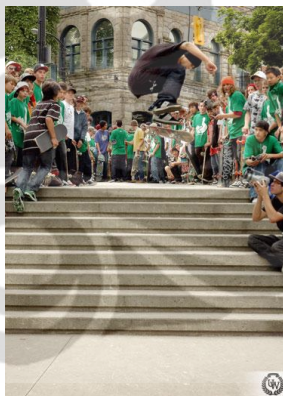


Gambar 2.4 Taman sebagai ruang publik yang direncanakan.

Sumber : [ci.corsicana.tx.us](http://ci.corsicana.tx.us)

- Ruang publik tidak terencana

Ruang publik tidak terencana yaitu ruang publik yang terjadi karena adanya kegiatan yang berulang atau berkumpulnya orang karena sesuatu yang menarik perhatian mereka. Misalnya area tangga taman yang digunakan oleh pemain skateboard yang memanfaatkan *railing* tangga sebagai tempat berlatih mereka sehingga tercipta ruang publik yang tidak disengaja karena ketertarikan mereka akan area tangga tersebut yang menantang mereka untuk bermain skateboard bersama dengan komunitas mereka.



Gambar 2.5 Tangga sebagai ruang publik yang tidak direncanakan.

Sumber : [underworld-shop.com](http://underworld-shop.com)

Ruang publik tidak terencana bisa jadi merupakan ekspresi masyarakat yang demokratis dalam menciptakan ruang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Namun terkadang hal ini merupakan respon masyarakat akan ruang publik terencana yang kurang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya.

## 2.3. Ruang Publik yang Demokratis

### 2.3.1. Definisi Ruang Publik yang Demokratis

Kita bisa melihat suatu ruang yang memperhatikan tujuan dalam membentuk masyarakat dimana gambaran masyarakat, cara pandang masyarakat, dan masalah-masalah demokrasi yang ada di masyarakat tercermin di dalamnya (Bickford, 2000). Menurut Carr (1922) ruang publik haruslah demokratis yang berarti ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya serta aksesibel untuk berbagai kondisi fisik manusia (Syamsura, n.d.). Suatu ruang publik menjadi sesuatu yang sangat penting karena fungsinya yang secara fisik mendukung aksi demokrasi.<sup>14</sup>

Menurut pendapat-pendapat diatas penulis menarik kesimpulan bahwa ruang publik yang demokratis adalah ruang publik yang berpotensi fisik mengembangkan sikap demokratis yang aksesibel untuk semua golongan masyarakat. Ruang publik secara fisik membantu menanamkan 3 prinsip demokrasi yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

Aksi-aksi demokrasi terjadi di ruang publik dengan suasana formal maupun informal. Kehidupan demokratis mendapatkan energi dan vitalitas dari jutaan momen partisipasi masyarakat dalam skala kecil di berbagai lokasi dan waktu yang berbeda, semuanya berkontribusi melalui percakapan publik (Benhabib, 1996, hlm.75; Dryzek,2000, hlm.74-5; Young, 2000,hlm.167 dalam Parkinson, 2006, hlm.8). Menurut Parkinson (2006, hlm.8) masyarakat memiliki kebebasan untuk berkumpul bersama dalam suatu kelompok kecil untuk mendiskusikan topik politik ataupun topik lainnya. Dalam suasana informal yang biasa terjadi di keseharian masyarakat nilai-nilai demokrasi bisa tertanam secara alami. Sedangkan dalam suasana formal yang terjadi di pemerintahan ataupun institusi, sekumpulan orang berkumpul dalam skala besar untuk melakukan percakapan, berdebat, dan mengambil keputusan bersama.

---

<sup>14</sup> John Parkinson: *Holistic Democracy and Physical Public Space*, *British Journal of Political Science Conference*, London, 2006, 2, 27 Maret 2011. < <http://www.pdfqueen.com>>



Pembahasan pada skripsi ini lebih menekankan pada aksi demokrasi pada suasana informal sehingga nilai-nilai demokrasi bisa tertanam secara alami dalam keseharian masyarakatnya. Nilai-nilai demokrasi akan lebih tertanam pada kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan aksi momentual seperti demonstrasi, pemilu, dll. Masyarakat yang demokratis memiliki kebutuhan sosial khusus yang harus dipenuhi didalamnya. Yang mana kegiatan masyarakat demokratis sarat akan berkumpul bersama untuk berdialog dan menyuarakan pendapatnya. Ruang publik menjadi sarana menguatkan keanggotaan, menggambarkan identitas masyarakat penggunanya, dan melakukan interaksi di dalamnya. Ruang publik yang demokratis secara fisik akan menggambarkan identitas masyarakatnya yang sarat akan nilai-nilai demokrasi.



Gambar 2.6 Ruang Publik sebagai Sarana Interaksi Sosial yang Menguatkan Keanggotaan dan Identitas di Keseharian  
Sumber : [tacugama.wildlifedirect.org](http://tacugama.wildlifedirect.org)



Gambar 2.7 Ruang Publik yang memunculkan kekuatan demokrasi pada saat aksi demonstrasi dalam menyuarakan pendapat masyarakat.  
Sumber : [pps.org](http://pps.org)

Pendekatan konsep demokrasi ke dalam fisik ruang membantu menciptakan ruang publik yang demokratis. Untuk bisa menciptakan ruang publik yang demokratis maka perlu diperhatikan dimensi-dimensi fisik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

### 2.3.2. Kriteria Ruang Publik yang Demokratis

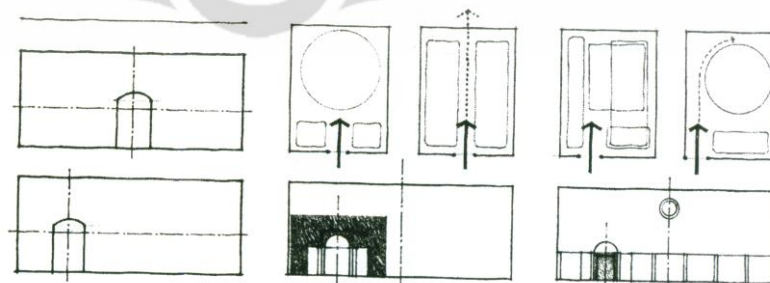
Ruang publik berdasarkan studi politik terfokus pada 2 dimensi, yaitu dimensi keterbukaan (*openness*) dan dimensi kepemilikan (*ownership*) (Goodsell,1988; Henaff dan Strong,2001).<sup>15</sup> Kedua dimensi ini secara fisik berpotensi untuk menciptakan ruang publik yang demokratis.

<sup>15</sup> *ibid.*, 4

- Dimensi Keterbukaan (*openness*)

Menurut Goodsell (1988) keterbukaan haruslah memperhatikan keberadaan akses masuk dan siapa saja yang bisa masuk ke dalamnya (Parkinson, 2006). Siapa saja bisa masuk ke dalam ruang publik dan meninggalkannya sesuka mereka. Sehingga penting untuk memperhatikan organisasi ruang publik dan peletakkan akses masuk yang turut menentukan tingkat aksesibilitas ruang publik. Dimensi keterbukaan ini nantinya akan memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses ruang publik sehingga ruang publik secara fisik terbuka untuk semua masyarakat.

Dalam teori Goodsell belum dijelaskan mengenai tata letak akses masuk dan pengaruhnya sehingga penulis mencoba mengaitkan dengan teori Ching. Menurut Ching (2000) letak sebuah akses masuk yang relatif terhadap bentuk ruang yang dimasuki akan menentukan konfigurasi alur dan pola aktivitas di dalam ruang.<sup>16</sup> Yang mana konfigurasi alur akan menentukan tingkat aksesibilitas suatu ruang sedangkan pola aktivitas akan menentukan fungsi ruang nantinya. Dalam hal tata letak, sebuah akses masuk dapat diletakkan terpusat di dalam bidang depan sebuah bangunan atau ditempatkan di luar pusat bangunan dan menciptakan keadaan simetris di sekitar bukaan.

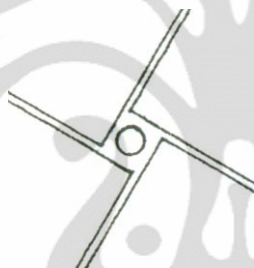


Gambar 2.8 Tata letak akses masuk suatu ruang

Sumber : Buku Bentuk, Ruang, dan Tatanan karangan Francis D.K. Ching, tahun 2000.

<sup>16</sup> Francis D.K. Ching, *Bentuk, Ruang, dan Tatanan*, Jakarta: Erlangga, 2000, 239.

Perpotongan atau persimpangan jalan merupakan titik pengambilan keputusan bagi orang yang akan melaluinya (Ching, 2000, hlm.252). Seringkali ruang di perpotongan jalan tersebut menjadi magnet penarik manusia untuk melakukan aktivitas publik di dalamnya. Karena ruang tersebut mempertemukan manusia dari ruang terpisah ke dalam satu titik. Aksesibilitasnya yang tinggi membuka peluang yang lebih besar untuk orang masuk ke dalamnya. Hal ini akan memberikan kebebasan dalam mengakses ruang publik yang sarat akan masyarakat plural sehingga memungkinkan semua golongan masyarakat mengakses ruang publik tersebut.



Gambar 2.9 Perpotongan jalan yang potensial ramai oleh aktivitas publik  
Sumber : Buku Bentuk, Ruang, dan Tataan karangan Francis D.K. Ching, tahun 2000.



Gambar 2.10 Bundaran HI berada di ruang perpotongan jalan biasa digunakan untuk demonstrasi dalam menyuarkan aspirasi masyarakat  
Sumber : matanews.com

Penulis menyimpulkan faktor penting dalam dimensi keterbukaan sebagai salah satu faktor pembentuk ruang publik yang demokratis adalah aksesibilitas yang tinggi yang ditandai oleh keberadaan akses masuk, organisasi ruang publik itu sendiri, dan juga fungsi ruang publik tersebut.

- Dimensi Kepemilikan (*ownership*)

Ruang publik seharusnya dimiliki bersama namun terkadang adanya kepemilikan golongan tertentu pada suatu ruang membatasi orang untuk masuk ke ruang publik tersebut. Sedangkan menurut Pennock (1980) kepemilikan mendefinisikan apakah sesuatu itu terbuka atau tidak (Parkinson, 2006, hlm.4). Sehingga dimensi kepemilikan sangat mempengaruhi kebebasan masyarakat dalam mengakses ruang publik.

Waldron (1988) menambahkan adanya dimensi kepemilikan pun berpotensi untuk membagi ruangan ke dalam bagian yang terpisah sehingga seringkali ditempati oleh beberapa individu tertentu (Parkinson, 2006, hlm.5). Hal ini disebabkan oleh dua masalah, yaitu masalah pengorganisasian ruang publik itu sendiri dan teritorial yang bisa memberikan persepsi ganda secara geografis dan batas. Waldron tidak menjelaskan definisi teritori sehingga penulis mencari sumber lain. Menurut Paul A.Bell (2001) dalam bukunya *Environmental Psychology* teritori adalah tempat yang dimiliki atau dikontrol oleh satu orang atau lebih.<sup>17</sup> Batas teritorial bisa secara fisik ataupun nonfisik. Namun pada bahasan kali ini akan dijelaskan teritorial secara fisik saja yang mana biasanya ditandai oleh elemen arsitektural seperti dinding, pagar, perbedaan warna & material, kursi, meja, dll. Keberadaan elemen-elemen fisik itulah yang nantinya akan mempengaruhi kebebasan masyarakat dalam mengakses suatu ruang publik.

Dengan terpenuhinya fisik ruang publik yang memiliki dimensi keterbukaan dan kepemilikan, maka ruang publik akan bisa berperan dalam mengembangkan sikap demokratis. Masyarakat akan diberikan kebebasan dalam mengakses ruang publik sehingga akan tercipta pengguna ruang publik yang prural yang memiliki hak yang sama dalam menggunakan ruang publik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi sehingga masyarakat bisa mengembangkan sikap demokratis di dalamnya.

### **2.3.3. Perspektif Penciptaan Ruang Publik yang Demokratis**

Untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis keberadaan ruang teritorial, institusi masyarakat dan pemerintahan sangat penting adanya. Suatu ruang perlu melakukan pengkonsepan kembali yang mendukung wujud demokrasi, sepanjang demokrasi menggambarkan ruang dan sepanjang ruang menggambarkan demokrasi. (Lefebvre,1991; dalam Jenlink, 2007, hlm.433).

Henri Lefebvre (1991) dalam bukunya "*The Production of Space*" menyatakan bahwa ruang harus dimengerti dari tiga perspektif dengan tujuan untuk memudahkan penyesuaian dengan masyarakat.<sup>18</sup> Yaitu :

<sup>17</sup> Paul A.Bell,dkk, *Environmental Psychology*, USA: Thomson Learning, 2001, 276

<sup>18</sup> Patrick M. Jenlink, *Creating Public Spaces and Practiced Places for Democracy, Discourse, and the Emergence of Civil Society*, Springer Science+Business Media, 2007, 434, 30 Maret 2011.

< <http://www.springerlink.com/content/349427mmux95x674/>>

- *representations of space (l'espace percu)*
- *spatial practices (l'espace concu)*
- *spaces of representations (l'espace ve'cu)*

Tiga perspektif dari ruang ini menjelaskan tentang bagaimana ruang bisa bekerja dan berkomunikasi sebagai aksi sosial dalam menciptakan ruang baru untuk masyarakat demokratis. Skema Lefebvrian ini melihat dari kesatuan diantara fisik, mental, dan sosial. Skema ruang Lefebvre memungkinkan aktor sosial untuk mengerti bagaimana menciptakan ruang publik yang demokratis untuk masyarakatnya.

- *Spatial Practises (l'espace percu)*

*Spatial Practises (l'espace percu)* memposisikan ruang sebagai bentuk fisik, dimana faktor lokasi dan fisik ruang itu sendiri mempengaruhi karakter dari pembentukan sosial penggunaannya. Perspektif ini memperhatikan kegiatan sehari-hari dan pengalaman pengguna yang bisa menciptakan ruang sosial masyarakat. Kegiatan sehari-hari ini secara terus-menerus mempengaruhi ruang spasial baik secara bentuk fisik dan juga pembentukan persepsi individu dan fungsi ruang.

- *Representations of Space (l'espace concu)*

Representasi mengacu pada konsepsi ruang, ruang hasil pemikiran arsitek, perencana, dan birokrat. Perspektif ruang ini selalu menyisakan ketidakjelasan sejak ruang lebih dipahami dibandingkan ditinggali. Ruang merupakan pertemuan antara pemahaman dan abstraksi yang berisi rencana dan design yang membentuk konsepsi aturan ruang.

- *Spaces of Representations (l'espace ve'cu)*

*Spaces of Representations (l'espace ve'cu)* adalah ruang dari pengalaman hidup. Dimana ruang sebagai simbol dan gambaran dari masyarakat penggunaannya. Perspektif ini menggambarkan objek fisik dalam suatu ruang menyimbolkan pengalaman kehidupan dan memberi arti pada ruang tersebut.

*Spaces of Representations (l'espace ve'cu)* menginterpretasikan ruang sebagai hasil dan termodifikasikan sepanjang waktu tergantung dengan penggunaannya.

Masyarakat menghasilkan ruang ; baik bersifat publik atau privat, bersejarah atau kekinian, demokratis atau non-demokratis, adalah didasari oleh tiga perspektif yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengacu pada *spatial practices, representations of space, dan spaces of representation* (Lefebvre, 1991; dalam Jenlink, 2007, hlm.435). Ketika menciptakan ruang publik adalah hasil perpaduan antara rasa, pemahaman, dan kehidupan. Ruang dan manusia keduanya saling mempengaruhi dan menciptakan hubungan timbal balik yang bisa menciptakan ruang publik yang demokratis.

Dalam hal ini demokrasi yang secara alami bisa kita rasakan adalah di ruang publik lingkungan rumah tinggal dimana demokrasi yang sebenarnya tidak hanya dirasakan di tataran para elit politik saja namun di keseharian masyarakatnya.

#### **2.4. Ruang Publik yang Demokratis di RUSUNA**

Lingkungan rumah tinggal merupakan cermin kejujuran dari suatu kehidupan masyarakat. Sebagai penganut demokrasi, masyarakat Indonesia harus mampu melestarikan nilai-nilai demokrasi dalam kesehariannya. RUSUNA merupakan rumah tinggal yang menjembatani kepentingan negara dan kepentingan masyarakatnya. Sehingga seharusnya sarat akan nilai-nilai demokrasi baik di kehidupan masyarakatnya maupun lingkungan fisik yang menunjang kebutuhan masyarakatnya yang demokratis.

##### **2.4. 1. Definisi RUSUNA**

Definisi Rumah Susun menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 adalah “Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dipergunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.”<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Indyastari Wikan Ratih, *Efektivitas Ruang Publik di Rumah Susun: Kajian Perilaku Penghuni Rusu., Bandung*, 2005,8, 21 Februari 2011. < <http://www.ar.itb.ac.id/wdp>>

Sedangkan RUSUNA merupakan Rumah Susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. RUSUNA merupakan respon pemerintah akan kondisi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memadai, tingginya tingkat kebutuhan akan rumah dan juga kelangkaan tanah di perkotaan. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses rumah tinggal yang layak mengakibatkan munculnya pemukiman liar (*squatter*). Potter dan Evans (1998) mendefinisikan permukiman liar (*squatter or illegal settlement*) sebagai suatu kawasan dimana orang-orang bertempat tinggal tanpa adanya izin penggunaan lahan ataupun izin perencanaan (Wihardi, 2010). RUSUNA merupakan upaya penataan lingkungan pemukiman kumuh dan liar menjadi lingkungan yang lebih terpadu dan juga berperan dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

#### 2.4.2. Ruang publik RUSUNA

RUSUNA memiliki ruang publiknya sendiri dimana warga RUSUNA secara bersama-sama bisa berinteraksi satu sama lain. Menurut Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 pasal 27 tentang Rumah Susun menyatakan dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan ruangan-ruangan dan atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan masyarakat, tempat bermain bagi anak-anak, dan kontak sosial lainnya, sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>20</sup> Yang mana menekankan akan pentingnya keberadaan ruang publik dalam suatu lingkungan perumahan, dalam hal ini adalah RUSUNA.



Gambar 2.11 Tempat bermain anak-anak di RUSUNA  
Sumber : Buku saku dinas perumahan provinsi DKI Jakarta tahun 2008



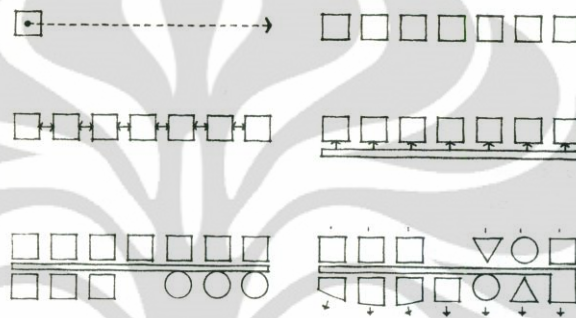
Gambar 2.12 Ruang serbaguna di RUSUNA  
Sumber : Buku saku dinas perumahan provinsi DKI Jakarta tahun 2008

Dalam keseharian masyarakat di lingkungan perumahan terjadi pengorganisasian pergerakan sosial di dalamnya. Dimana memungkinkan terjadinya perubahan sosial

<sup>20</sup> Mokh Subkhan, *Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Cengkareng Jakarta Barat*, 2008, 21 Februari 2011. < <http://eprints.undip.ac.id>>

politik didalamnya dengan aktivitas di dalamnya. Setiap aktivitas bersifat politik jika bertujuan membawa perubahan yang mempengaruhi masyarakat (Sorbom,2002). Ruang publik secara fisik mampu melakukan pengorganisasian sosial di dalamnya.

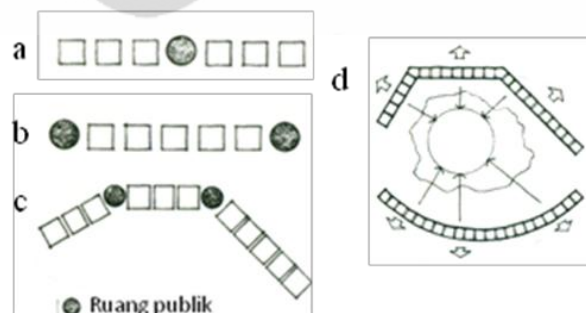
Mayoritas RUSUNA memiliki pola organisasi ruang yang linier sehingga hal ini akan mempengaruhi pembentukan ruang publik di lingkungan RUSUNA tersebut (Lihat Gambar 2.13).



Gambar 2.13 Organisasi linier yang umum di RUSUNA

Sumber : Buku Bentuk, Ruang, dan Tataan karangan Francis D.K. Ching, tahun 2000.

Karena panjang karakternya, organisasi linier menunjukkan suatu arah, dan menggambarkan gerak, perluasan dan pertumbuhan. Untuk membatasi pertumbuhannya, organisasi-organisasi linier dapat dihentikan oleh suatu bentuk atau ruang yang dominan, dengan adanya tempat masuk yang menonjol dan tegas, atau penggabungan dengan bentuk bangunan lain atau karena keadaan topografi tapaknya.<sup>21</sup> Dengan ruang yang dominan tersebut biasanya digunakan sebagai ruang publik sebagai sarana interaksi sosial penghuni.



Gambar 2.14 Ruang-ruang publik di organisasi linier

Sumber : Buku Bentuk, Ruang, dan Tataan karangan Francis D.K. Ching, tahun 2000.

<sup>21</sup> Francis D.K. Ching, *Bentuk, Ruang, dan Tataan*, Jakarta: Erlangga, 2000, 198.



Ruang-ruang publik secara fungsional penting keberadaannya, jika berada di organisasi linier dapat ditegaskan oleh ukuran, bentuknya, dan juga menurut lokasinya<sup>22</sup>: (Lihat gambar 2.14)

- a. Diantara rangkaian linier
- b. Pada ujung rangkaian linier.
- c. Pada titik-titik belok bentuk linier yang terpotong-potong.
- d. Keluar dari organisasi linier.

Dengan kepadatan penghuni RUSUNA yang tinggi dan keterbatasan ruang publik yang ada menjadi masalah yang patut disoroti. Kesesuaian antara jumlah penghuni dengan kapasitas ruang publik dan organisasi ruang publik menjadi pertimbangan penting dalam membangun konstruksi sosial masyarakat yang demokratis.

#### **2.4. 3. Ruang publik RUSUNA yang Demokratis**

Ruang publik RUSUNA yang demokratis secara umum sama dengan konsep dasar ruang publik demokratis yang dijelaskan di subbab sebelumnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *ibid.*,198.

<sup>23</sup> Lihat penjelasan mengenai ruang publik yang demokratis pada subbab 2.3 hal.16, secara fisik ruang publik RUSUNA yang demokratis merujuk pada teori Goodsell (1988) mengenai dimensi fisik yang mampu menciptakan ruang publik yang demokratis pada subbab 2.3.2 hal. 17.

## **BAB 3**

### **STUDI KASUS DAN ANALISIS**

Untuk melihat implementasi ruang publik yang demokratis, maka penulis mengadakan pengamatan terhadap dua lokasi RUSUNA di Jakarta, yaitu RUSUNA Harum Tebet Barat dan RUSUNA Bidaracina dengan kelas sosial ekonomi yang berbeda. Dengan ini bisa dilihat juga apakah faktor kelas sosial ekonomi mempengaruhi ruang publik RUSUNA lebih demokratis atau tidak. Dengan membandingkan analisis kedua RUSUNA tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan seperti apakah fisik ruang publik demokratis yang berperan mengembangkan sikap demokratis.

Dalam studi kasus, penulis akan menganalisis mengenai pengorganisasian ruang publik RUSUNA dikaitkan dengan teori ruang publik yang demokratis, kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalamnya beserta permasalahannya, dan peran fisik ruang publik sebagai upaya pengembangan sikap demokratis.

#### **3.1 RUSUNA Harum Tebet Barat**

##### **3.1.1. Deskripsi Umum RUSUNA Harum Tebet Barat**



Gambar 3. 1. Kondisi Umum RUSUNA Harum Tebet Barat  
Sumber : dok.pribadi

RUSUNA Harum Tebet Barat yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan ini merupakan RUSUNA terbaik yang ada di Jakarta. RUSUNA ini memiliki lahan seluas 1,9 ha yang terdiri dari 4 blok, dimana masing-masing blok terdiri dari 5 lantai. Mulanya pada tahun 1994 hanya dibangun 1 blok saja dan pada tahun 1995 diperluas menjadi 4 blok. RUSUNA ini memiliki 320 unit yang terdiri dari satu tipe, yaitu tipe 21.

RUSUNA ini pada mulanya diperuntukan bagi korban kebakaran di perumahan yang ada di tebet. Namun sekarang ini banyak dari mereka yang sudah tidak tinggal di RUSUNA tersebut kemudian lebih memilih untuk menjualnya atau menyewakannya pada pihak ke dua atau bahkan ke tiga.

### 3.1.2. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Penghuni RUSUNA Harum

#### Tebet Barat

RUSUNA ini mayoritas dihuni oleh masyarakat menengah dan menengah ke atas. Secara konseptual memang RUSUNA diperuntukkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Namun pada kenyataannya di RUSUNA ini mayoritas penghuni asli menjual atau menyewakannya kepada pihak ke dua.<sup>24</sup> Penghuni asli melihatnya sebagai peluang ekonomi dan lebih memilih untuk mencari rumah yang lebih murah. Letak RUSUNA yang sangat strategis ini yaitu di Tebet menarik minat masyarakat untuk menghuni di RUSUNA ini. Mayoritas penghuni bekerja kantoran dan beberapa ada yang membuka usaha di lingkungan RUSUNA.

Komposisi penghuni asli : penyewa atau pendatang adalah 25% : 75%. Penghuni asli merupakan masyarakat menengah dan penyewa atau pendatang mayoritas masyarakat menengah ke atas.<sup>25</sup> Penghuni asli secara sosial lebih ramah dan bermasyarakat dengan sekitarnya sedangkan penyewa atau pendatang lebih individualistis mengingat jam terbang kerjanya lebih padat dibandingkan dengan penghuni asli.

RUSUNA ini secara latar belakang budaya bagaikan bhineka tunggal ika karena banyak pendatang dari berbagai suku yang menghuni di RUSUNA ini. Suku yang ada di RUSUNA ini adalah suku Jawa, Sunda, Ujung Pandang, Betawi, Bali, Padang, dan Madura. Walaupun berbeda-beda suku tidak ada kelompok khusus antar suku yang terbentuk di RUSUNA ini, semuanya menyatu dalam bersosialisasi.

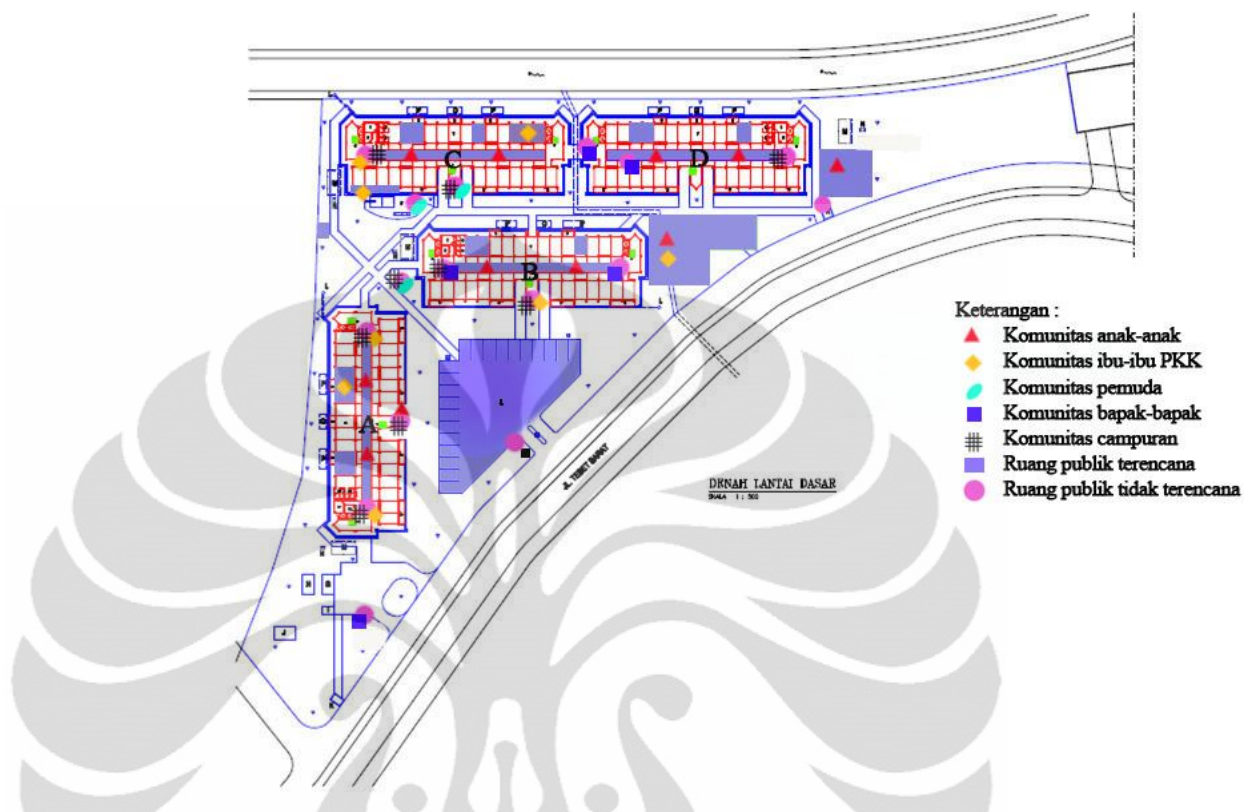
Secara kegiatan dalam sosialisasi antar penghuni, tercipta beberapa komunitas sosial di RUSUNA ini. (Lihat Tabel 3.1). Antar komunitas saling membaaur satu sama lain dan berbagi ruang publik. Namun yang bermasalah adalah komunitas ibu-ibu PKK yang mau senam dan anak-anak yang mau bermain bola terkadang berebut lapangan karena keterbatasan penyediaan lapangan.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bu Hani, Kepala Koordinator Kebersihan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) RUSUNA Harum Tebet Barat, 27 April 2011

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bu Tini, Ketua Ibu-Ibu PKK RUSUNA Harum Tebet Barat, 3 Mei 2011

Tabel 3.1 Komunitas sosial di RUSUNA Harum Tebet Barat  
 Sumber : Hasil observasi dan wawancara di RUSUNA Harum Tebet Barat, 3 Mei 2011

No	Jenis Komunitas	Waktu kumpul	Kegiatan bersama komunitas	Tempat komunitas biasa berkumpul
1	Komunitas anak-anak	Siang, sore	Bermain, bermain futsal	Koridor lantai dasar, lapangan olahraga, dan pintu masuk blok 1-A.
2	Komunitas ibu-ibu PKK	Pagi, siang, dan sore	Aktivitas Posyandu (2 minggu sekali), arisan (sebulan sekali), program pelatihan keterampilan ibu-ibu (sebulan 2x), senam ibu-ibu (seminggu 2x setiap senin dan rabu), latihan marawis yang dilakukan 3x seminggu, dan mengobrol	Ruang publik tidak terencana di koridor, ruang serbaguna dan aula, dan lapangan futsal.
3	Komunitas pemuda	Sore, malam	Mengobrol, bernyanyi dan bermain gitar bersama	Ruang publik tidak terencana yang dekat dengan warung makan.
4	Komunitas bapak-bapak	Siang, sore, dan malam	Mengobrol, main kartu, dan main catur	Ruang publik tidak terencana di koridor.
5	Komunitas Campuran	Siang, sore, malam	Mengobrol. Komunitas campuran ini kadangkala memecah gap antara 4 komunitas yang lain.	Ruang publik tidak terencana di koridor dan yang dekat dengan warung makan



Gambar 3.2 Persebaran komunitas di ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat  
 Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta

### 3.1.3. Pandangan Beberapa Penghuni RUSUNA Harum Tebet Barat Mengenai Demokrasi dan Implementasinya

Pandangan beberapa penghuni RUSUNA mengenai demokrasi menjadi sangat penting untuk tahu sejauh mana mereka mengenal demokrasi dan apakah nilai-nilai demokrasi sudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut wawancara yang dilakukan pada 7 penghuni, sebagian besar dari mereka memahami demokrasi sebagai suatu kebebasan.<sup>26</sup> Yang mana menurut Bu Tini (ketua ibu-ibu PKK RUSUNA) dalam kehidupan sehari-hari demokrasi dimaknai kebebasan yang dilakukan oleh masing-masing penghuni namun tidak mengganggu kepentingan penghuni lainnya. Bu Tini selaku penghuni asli sadar selama dia tinggal di RUSUNA nilai-nilai demokrasi belum tertanam baik dalam kehidupan penghuni.

<sup>26</sup> Wawancara dengan 7 penghuni RUSUNA Harum Tebet Barat yaitu Bu Hani (kepala koordinator kebersihan PPRS, Bu Tini (ketua ibu-ibu PKK), Ketua RT Blok B, dan 4 penghuni, 27 April 2011, 29 April 2011, 3 Mei 2011.

Menurut pandangan saya pernyataan-pernyataan yang dilontarkan penghuni mengenai demokrasi masih sekedar demokrasi dalam implementasi politik yang dijelaskan dalam tataran organisasi RUSUNA. Demokrasi lebih dikenal implementasinya melalui pemilu ketimbang dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Demokrasi masih terasa asing dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga prinsip-prinsip demokrasi yang terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme mengalir begitu saja tanpa arah.

Namun walaupun secara konsep mereka tidak paham betul apa itu demokrasi dalam bermasyarakat mereka menerapkan poin-poin penting dari prinsip-prinsip demokrasi tersebut, yaitu :

- Berinteraksi sosial dengan baik selama bertetangga mengingat penghuni-penghuni RUSUNA memiliki keanekaragaman suku, kelas sosial dan ekonomi didalamnya.



Gambar 3.3 Kondisi RUSUNA yang bersih dan indah. Jarang yang menjemur pakaian sembarangan.  
Sumber : dok.pribadi

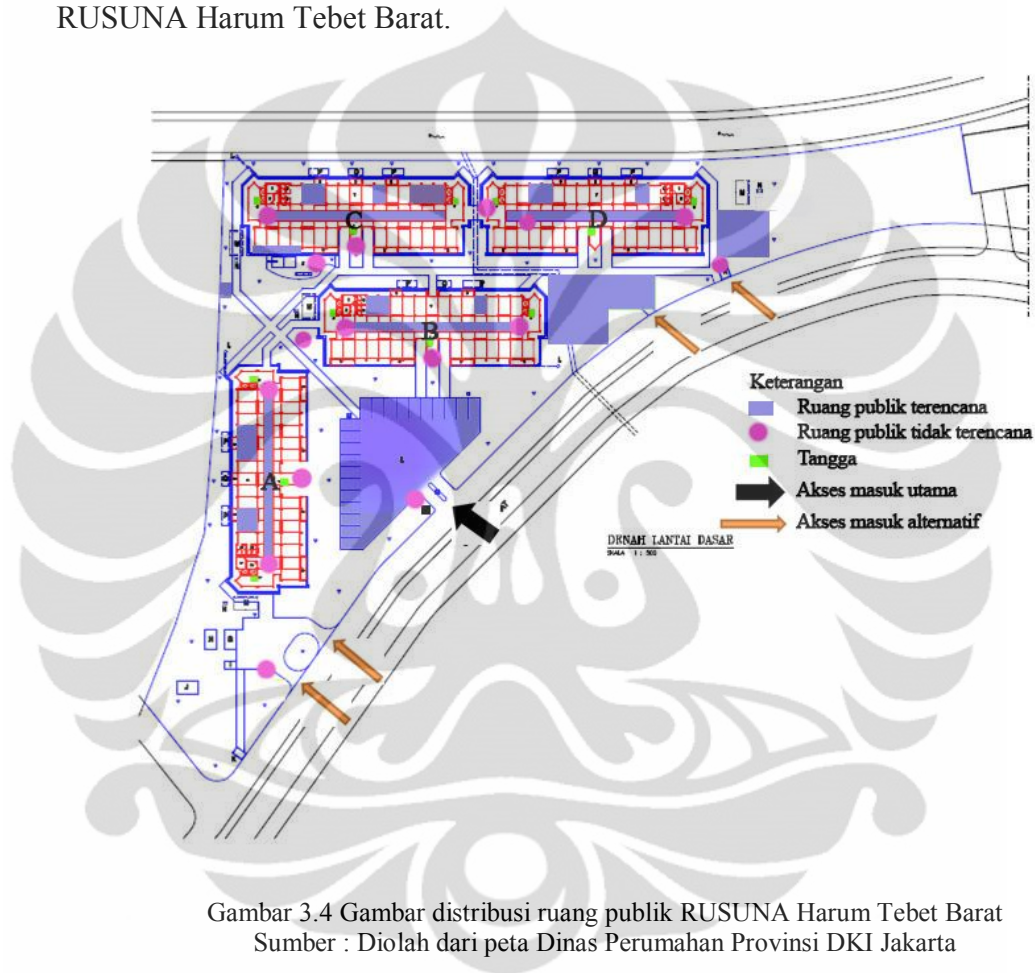
- Penghuni satu sama lain bebas mengeluarkan pendapat baik di forum-forum formal atau informal ataupun di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya ada penghuni yang menegur penghuni lain untuk tidak menjemur pakaian sembarangan di

luar sehingga bisa dilihat di RUSUNA ini jarang sekali yang menjemur pakaian sembarangan di luar. Hal ini memberikan dampak positif bagi keindahan dan kebersihan RUSUNA tersebut.

Beberapa konflik sosial terjadi juga di kalangan petinggi RUSUNA, yaitu antara pengurus RW dan PPRS. Menurut Bu Tini (ketua ibu-ibu PKK RUSUNA) selama kepengurusan sekarang ini terjadi kecemburuan sosial diantara keduanya. PPRS secara level organisasi ingin berada di atas RW sehingga bisa lebih berkuasa dan mengatur kepengurusan RW.

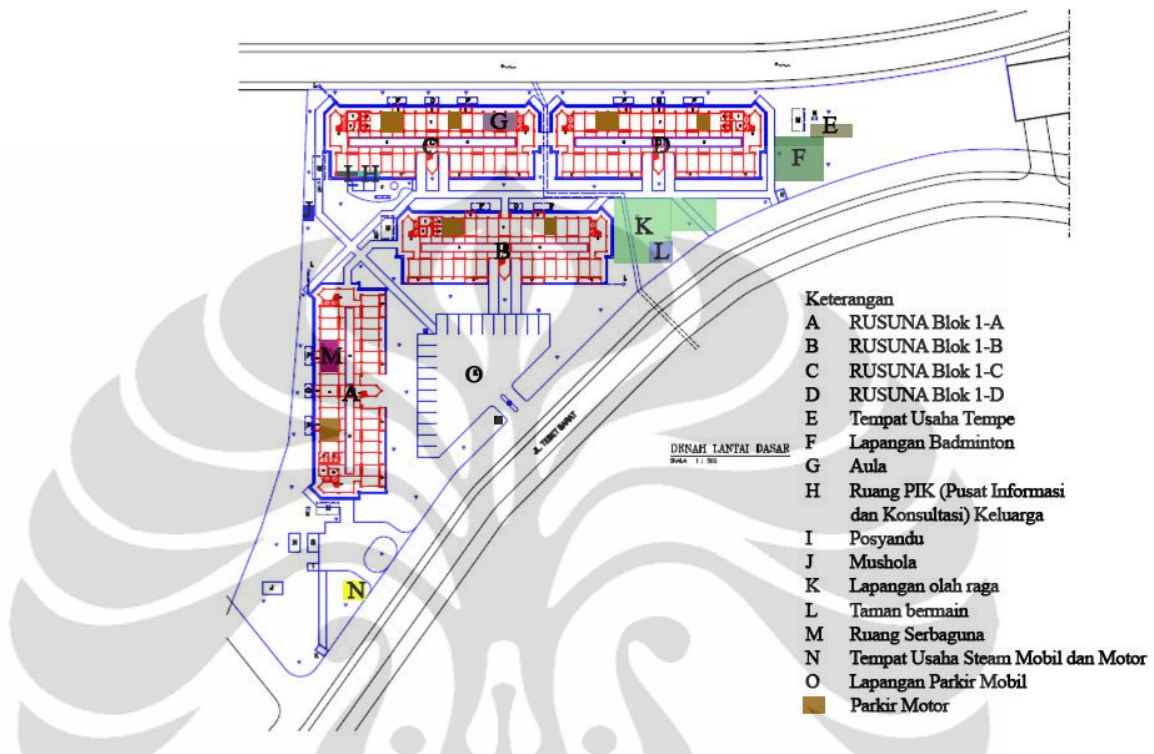
### 3.1.4. Ruang Publik di RUSUNA Harum Tebet Barat

Ruang publik yang demokratis berperan dalam pengembangan sikap demokratis. Ruang publik RUSUNA ini terdiri ruang publik yang terencana dan tidak terencana. Berikut adalah distribusi ruang publik terencana dan tidak terencana yang ada di RUSUNA Harum Tebet Barat.



Gambar 3.4 Gambar distribusi ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat  
Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta

### 3.1.4.1 Ruang Publik yang Terencana RUSUNA Harum Tebet Barat



Gambar 3.5 Distribusi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat  
Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta

Fasilitas ruang publik direncanakan oleh arsitek sebagai ruang interaksi sosial yang terpusat di lantai dasar. Secara aksesibilitas mudah dijangkau oleh semua penghuni karena penghuni tentunya akan melewati lantai dasar ketika hendak bepergian. Namun di lain pihak hal ini akan membuat penghuni di lantai atas terutama lantai 4 malas turun ke lantai dasar karena letaknya yang jauh

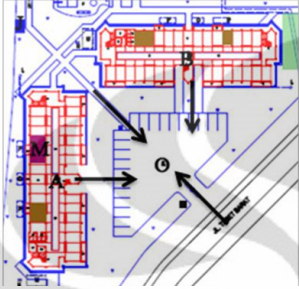

Berikut analisis fisik ruang publik yang demokratis menurut teori Goodsell.<sup>27</sup> Penulis mengelompokkan 3 organisasi ruang publik terencana yang ada di RUSUNA. (Lihat tabel 3.2.)

<sup>27</sup> Lihat penjelasan mengenai kriteria ruang publik yang demokratis, teori Goodsell pada subbab 2.3.2 hal. 17.



Tabel 3.2. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat menurut teori Goodsell

Sumber : Diolah dari hasil survei RUSUNA Harum Tebet Barat, April-Mei 2011

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>			
<b>No</b>	<b>Organisasi Ruang Publik Terencana</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Fungsi ruang</b>
1	 <p>Gambar 3.6 Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat 1 Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Ruang publik O dilingkupi oleh 2 blok yang mengarah padanya. Pola ruang yang keluar dari organisasi linier RUSUNA dengan bentuk yang berbeda memberikan efek yang menonjol untuk dijadikan ruang publik utama pada RUSUNA ini. Merupakan ruang dominan pusat secara pola ruang.</p>	<p>Ada 4 akses masuk dimana salah satunya adalah akses utama.</p> <p>Alur sirkulasi dari berbagai blok pun menghubungkan secara efektif menuju Ruang publik O.</p> <p>Ruang ini memiliki aksesibilitas yang sangat tinggi</p>	 <p>Gambar 3.7 Sarana parkir mobil sepanjang lapangan yang ada di depan sampai belakang RUSUNA Sumber : dok.pribadi</p> <p>Ruang publik ini dijadikan sarana parkir mobil. Dimana ruang parkir cukup mendominasi ruang publik di RUSUNA ini.</p>
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>			
<p>Batasan fisik teritorial ruang publik ini adalah blok-blok RUSUNA yang mengelilingi ruang publik ini dan juga pagar utama RUSUNA. Karena dikelilingi oleh 2 blok RUSUNA dan letaknya mudah diakses dari 2 blok lainnya akan menyebabkan penghuni di dalamnya pun merasa memiliki ruang publik ini secara bersama.</p>			

Tabel 3.2. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat menurut teori Goodsell (sambungan)



<b>Kesimpulan Awal</b>			
<p>Organisasi seperti ini berpotensi untuk menarik simpul masa lebih karena aksesibilitas tinggi dan memiliki pola ruang yang menonjol dari yang lainnya. Peletakan yang berada di pusat ini sangat strategis, memiliki aksesibilitas yang tinggi dari berbagai blok dan akses masuk sehingga meminimalisir klaim kepemilikan. Sangat berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis. Dimana ruang publik dengan nilai interaksi sosial akan berpotensi menanamkan nilai-nilai demokrasi pada penghuninya. Namun sangat disayangkan ruang ini malah digunakan sebagai tempat parkir mobil dimana secara fungsi kurang mendukung penanaman nilai-nilai demokrasi di dalamnya.</p>			
<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>			
<b>No</b>	<b>Organisasi Ruang Publik Terencana</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Fungsi ruang</b>
2	 <p>Gambar 3.8 Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat 2 Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Merupakan bagian dari organisasi linier yang berada di antaranya. Area ungu (■) diapit oleh organisasi linier dengan bentuk yang berbeda. Area ini berpotensi memiliki fungsi berbeda dari ruang sekitarnya. Area ungu (■) yang memanjang ini menunjukkan suatu arah yang bisa menjadi sirkulasi untuk mengantarkan ke luar blok.</p>	<p>Area ungu (■) cukup strategis dimana bisa diakses dari 3 akses masuk dan juga 3 tangga sehingga menghubungkan dengan lantai di atasnya. Memiliki aksesibilitas tinggi di dalam blok.</p>	<p>Area ungu (■) merupakan koridor utama yang difungsikan sebagai ruang sirkulasi penghuni RUSUNA. Namun dialihfungsikan penghuni untuk parkir motor dan ruang interaksi sosial.</p>  <p>Gambar 3.9 Kondisi koridor lantai dasar dimana banyak motor di parkir Sumber : dok.pribadi</p>  <p>Gambar 3.10 Alih fungsi koridor lantai dasar menjadi ruang interaksi sosial penghuni. Sumber : dok.pribadi</p>

Tabel 3.2. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat menurut teori Goodsell (sambungan)

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>			
<b>No</b>	<b>Organisasi Ruang Publik Terencana</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Fungsi ruang</b>
	Sedangkan ruang publik M yang merupakan bagian dari organisasi linier dengan bentuknya yang sama secara pola ruang tidak menunjukkan fungsi ruang yang berbeda dengan sekitarnya.		<p>Sedangkan ruang publik M merupakan ruang serbaguna yang digunakan untuk acara formal warga RUSUNA, rapat RT/RW, dan rapat PPRS. Menjadi tempat berinteraksi sosial dan menyuarakan aspirasi penghuni.</p>  <p>Gambar 3.11 Ruang serbaguna. Aula memiliki tipikal ruang yang sama dengan ruang serbaguna. Sumber : dok.pribadi</p>
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>			
<p>Batasan fisik teritorial ruang publik ini adalah ruang-ruang linier dalam blok RUSUNA yang melingkupi koridor dan ruang serbaguna. Sehingga setiap pemakai ruang-ruang tersebut semuanya diberikan akses yang sama untuk bisa menuju koridor dan ruang serbaguna yang menimbulkan rasa kepemilikan bersama.</p>			
<b>Kesimpulan awal</b>			
<p><b>Koridor</b> : Pola ruang area ungu (■) berpotensi sebagai ruang publik demokratis karena memiliki aksesibilitas yang tinggi dengan peletakannya yang strategis. Fungsi ruangnya sesuai dengan potensinya sebagai area sirkulasi. Area ini berpotensi pula sebagai ruang publik untuk interaksi sosial namun sayangnya tidak dibuat sehingga penghuni memilih untuk mengalih fungsi koridor untuk ruang interaksi sosial.</p> <p><b>Ruang serbaguna / Aula</b> : Ruang ini secara fungsi sangat mencerminkan nilai-nilai demokrasi mengingat interaksi sosial yang terjalin disini. Warga bebas berekspresi bersama disini, bersatu untuk mempererat hubungan antar penghuni, dan menyuarakan aspirasi warganya di sini. Aksesibilitasnya cukup tinggi namun karena memiliki tipikal yang sama dengan ruang lainnya tidak menjadikannya spesial. Sedangkan fungsi dan keterbatasan ruang menunjang kekurangan fisik. Untuk menciptakan ruang publik yang demokratis haruslah memperhatikan fisik dan fungsinya</p>			

Dimensi Keterbukaan (openness)			
No	Organisasi Ruang Publik Terencana	Aksesibilitas	Fungsi ruang
3	 <p>Gambar 3.12. Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat 3 Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Ruang ini berada di luar organisasi linier yang ada di ujung ruang. Pola seperti ini akan menyulitkan penghuni RUSUNA karena letaknya yang diujung akan mengurangi daya jangkauan bagi seluruh penghuni. Hal ini akan menimbulkan efek dominansi kelompok pada ruang tersebut. Karena ruang tersebut hanya mudah di akses oleh kalangan tertentu. Masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pola ruang publik RUSUNA yang seperti ini yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taman bermain yang jarang dimainkan oleh penghuni karena letaknya yang jauh dan juga beberapa fasilitas rusak.</li> <li>• Alih fungsi lapangan badminton (ruang publik F) menjadi lapangan parkir.</li> </ul>	<p>Terdiri dari 5 akses masuk dimana dekat dengan 2 akses masuk alternatif. Secara aksesibilitas tinggi di area tertentu saja. Namun, peletakkan di ujung ruang RUSUNA tidak mendukung fungsi ruang publik yang demokratis karena akan menimbulkan klaim kepemilikan komunitas tertentu pada ruang tersebut. Karena memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah.</p>	<p>Digunakan sebagai sarana olahraga dan taman bermain. Lapangan K yaitu lapangan futsal juga digunakan untuk senam ibu-ibu PKK.</p>  <p>Gambar 3.13. Kegiatan senam ibu-ibu PKK di lapangan futsal setiap 2 kali seminggu di sore hari. Sumber : dok.pribadi</p>  <p>Gambar 3.14. Kegiatan bermain futsal anak-anak setiap sore hari. Sumber : dok.pribadi</p>  <p>Gambar 3.15. Taman bermain anak-anak yang jarang digunakan lagi Sumber : dok.pribadi</p>

Tabel 3.2. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Harum Tebet Barat menurut teori Goodsell (sambungan)

<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>	
<p>Batasan fisik teritorial ruang publik ini adalah sudut RUSUNA blok 1-D dan blok 1-B juga pagar pintu masuk alternatif. Melihat fungsi ruang publik RUSUNA yang diperuntukkan untuk semua penghuni, batas teritorial seperti ini hanya akan menimbulkan rasa kepemilikan pada blok 1-D dan blok 1-B karena mereka lebih mudah mengakses ruang publik tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya konflik yang terjadi di ruang tersebut dimana terjadi alih fungsi lapangan badminton untuk semua penghuni menjadi lapangan parkir yang mayoritas digunakan oleh penghuni blok 1-D. (Lihat Gambar 3.16)</p>	
	
<p>Gambar 3.16. Lapangan badminton yang sudah beralih fungsi menjadi lapangan parkir. Sumber : dok.pribadi</p>	<p>Gambar 3.17 Anak-anak yang mendapat sebagian kecil lahan lapangan badminton untuk bermain. Sumber : dok.pribadi</p>
<b>Kesimpulan awal</b>	
<p>Organisasi ruang seperti ini tidak sesuai dengan ruang publik yang demokratis karena peletakannya di ujung bangunan akan memberikan aksesibilitas yang rendah dan berpotensi untuk didominasi oleh kelompok tertentu yang berada di dekat ruang tersebut. Mengingat fungsinya yang sangat penting yaitu sebagai sarana olahraga dan taman bermain anak-anak untuk seluruh penghuni RUSUNA sangat disayangkan karena tidak didukung dengan design fisik yang demokratis.</p>	

### 3.1.4.2 Ruang Publik yang Tidak Terencana RUSUNA Harum Tebet Barat

Berikut analisis 2 organisasi ruang publik tidak terencana pada RUSUNA menurut teori Goodsell.<sup>28</sup> (Lihat tabel 3.3.)

Tabel 3.3. Analisis organisasi ruang publik tidak terencana menurut teori Goodsell  
Sumber : Diolah dari hasil survei RUSUNA Harum Tebet Barat, 3 Mei 2011

Dimensi Keterbukaan ( <i>openness</i> )		
Organisasi Ruang Publik Tidak Terencana	Aksesibilitas	Fungsi ruang
 <p>Gambar 3.18. Pola tata letak ruang publik tidak terencana RUSUNA Harum Tebet Barat Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Pola-pola ruang publik tidak terencana, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berada di tiap akses masuk blok</li> </ul> <p>Pola ruang publik tidak terencana ini berada di ujung rangkaian linier yang bertepatan dengan akses masuk ke blok RUSUNA. Tersebar secara merata ke tiap blok sehingga penghuni bisa dengan mudah mengakses ruang publik tersebut sebagai ruang interaksi sosial mereka.</p>	<p>Akses masuk dekat dengan tangga menuju lantai atas sehingga secara akses tidak hanya strategis secara horizontal juga vertikal.</p>	<p>Digunakan sebagai ruang interaksi sosial penghuni tiap blok atau antar blok. Sebagai ruang untuk berdialog dan menyuarakan aspirasi mereka kepada sesama penghuni.</p>  <p>Gambar 3.19. Ruang publik tidak terencana dekat akses masuk blok. Sumber : dok.pribadi</p>

<sup>28</sup> Lihat penjelasan mengenai kriteria ruang publik yang demokratis, teori Goodsell pada subbab 2.3.2 hal. 17.

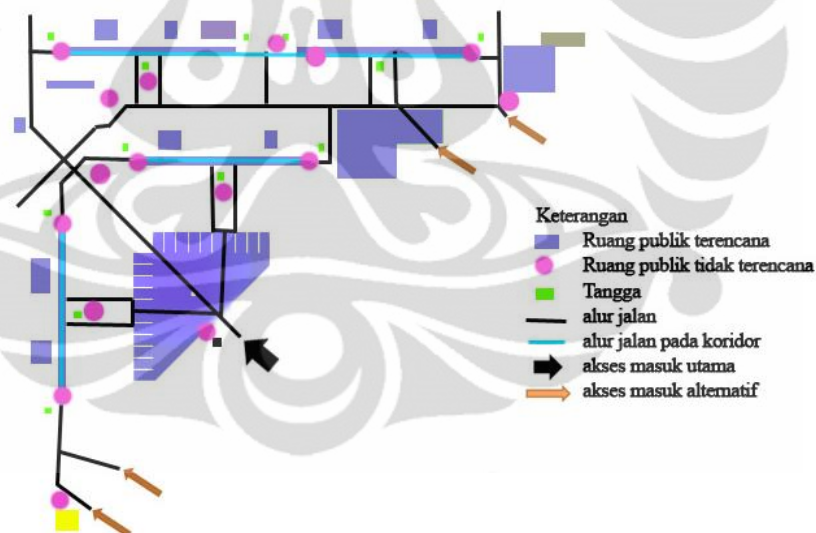
Tabel 3.3. Analisis organisasi ruang publik tidak terencana menurut teori Goodsell. (sambungan)

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>		
<b>Organisasi Ruang Publik Tidak Terencana</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Fungsi ruang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berada di sekitar perpotongan jalan antara blok 1-A , blok 1-B, dan blok 1-C</li> <li>Area di sekitar perpotongan jalan berpotensi menarik publik untuk beraktivitas didalamnya. Area ini sangat strategis karena terhubung dengan sumbu akses masuk utama RUSUNA sehingga membantu mengarahkan penghuni untuk ke area tersebut.</li> </ul>	<p>Seperti yang dijelaskan di bab 2 perpotongan jalan berpotensi ramai karena merupakan titik penghubung blok-blok RUSUNA di sekitarnya.</p> <p>Memiliki aksesibilitas tinggi dimana mudah di akses 4 blok RUSUNA dan terhubung dengan sumbu akses masuk utama.</p>	<p>Digunakan sebagai ruang interaksi sosial antar blok. Sebagai ruang untuk berdialog dan menyuarakan aspirasi mereka kepada sesama penghuni.</p>  <p>Gambar 3.20. Ruang publik tidak terencana yang ada di perpotongan jalan Sumber : dok.pribadi</p>
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>		
 <p>Gambar 3.21. Ruang publik tidak terencana di bawah tangga dekat akses masuk Sumber : dok.pribadi</p>	<p>Batasan fisik teritorial ruang publik yang tidak terencana adalah berupa kursi-kursi yang penghuni letakkan di spot-spot yang mereka inginkan. Mereka juga memanfaatkan bawah ruang tangga yang kosong sebagai ruang publik tidak terencana. Ruang yang dibuat dalam skala kecil dan tersebar merata ke semua blok berpotensi untuk menimbulkan rasa kepemilikan golongan tertentu pada ruang publik tersebut.</p>	

Tabel 3.3. Analisis organisasi ruang publik tidak terencana menurut teori Goodsell. (sambungan)

<b>Kesimpulan awal</b>
<p>Ruang publik tidak terencana merupakan bentuk ekspresi penghuni dalam menciptakan ruang publik mereka sendiri. Penghuni sadar akan kebutuhan ruang publik sebagai ruang interaksi sosial dimana mereka berdialog dan menyuarakan aspirasi mereka kepada sesama penghuni. Aktivitas mereka mencerminkan masyarakat yang demokratis. Karena tidak adanya ruang tersebut di tiap blok maka ada desakan kebutuhan akan ruang interaksi yang mereka buat sendiri secara sederhana. Ruang yang penghuni buat memenuhi syarat keterbukaan yang membuat semua penghuni bebas mengakses ruang publik tersebut. Namun karena ruang yang dibuat masih dalam skala kecil dan tersebar merata ke semua blok maka berpotensi untuk menimbulkan rasa kepemilikan golongan tertentu pada ruang publik tersebut.</p>

### 3.1.5 Kesimpulan Analisis Ruang Publik RUSUNA Harum Tebet Barat



Gambar 3.22. Analisis organisasi ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat terkait konfigurasi alur  
 Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta

Ruang publik terencana belum cukup demokratis untuk para penghuni sehingga penghuni membuat ruangnya sendiri berupa ruang publik tidak terencana. Adapun ruang publik terencana secara potensi fisik demokratis namun tidak didukung fungsi yang mendukung penanaman nilai-nilai demokratis seperti ruang interaksi sosial untuk berdialog dan menyuarakan aspirasi mereka. Ruang publik tidak terencana untuk interaksi sosial merupakan ruang penting yang secara alamiah menumbuhkan



nilai-nilai demokrasi pada penghuni. Dan mereka memanfaatkan dengan baik ruang yang mereka ciptakan sendiri sebagai ruang interaksi sosial mereka. Namun pola penyebaran ini walaupun sangat baik dalam memenuhi kebutuhan penghuni nampaknya akan menciptakan pemisahan-pemisahan komunitas penghuni RUSUNA. Hal ini akan mengurangi nilai demokrasi di ruang publik tersebut secara keseluruhan RUSUNA. Secara terperinci kesimpulan analisis bisa dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Kesimpulan analisis organisasi ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat menurut teori Goodsell

Sumber : Diolah dari hasil survei RUSUNA Harum Tebet Barat, April-Mei 2011

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>				
<b>No</b>	<b>Jenis Ruang Publik</b>	<b>Organisasi ruang publik</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Aktivitas</b>
1	Terencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekat dengan akses pintu masuk utama</li> <li>• Di apit oleh ruang-ruang organisasi linier namun hanya sebagai area sirkulasi</li> <li>• Dekat dengan pintu masuk alternatif dan ujung RUSUNA</li> </ul>	<p>Tinggi</p> <p>Tinggi</p> <p>rendah</p>	<p>memarkir mobil (tidak didukung aktivitas masyarakat demokratis<sup>29</sup>)</p> <p>Sirkulasi penghuni (tidak didukung aktivitas masyarakat demokratis)</p> <p>Sarana olahraga dan taman bermain anak-anak (didukung aktivitas masyarakat demokratis)</p>
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>				
Batas teritorial secara fisik sudah jelas dengan menggunakan elemen-elemen arsitektur namun kepentingan sosial banyak menembus batas teritorial tersebut sehingga banyak terjadi alih fungsi pada ruang publik terencana				
2	Tidak Terencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada di tiap akses masuk blok</li> <li>• Berada di sekitar perpotongan jalan antara blok A dan blok B</li> </ul>	<p>Tinggi</p> <p>tinggi</p>	<p>Interaksi sosial (didukung aktivitas masyarakat demokratis)</p> <p>Interaksi sosial (didukung aktivitas masyarakat demokratis)</p>

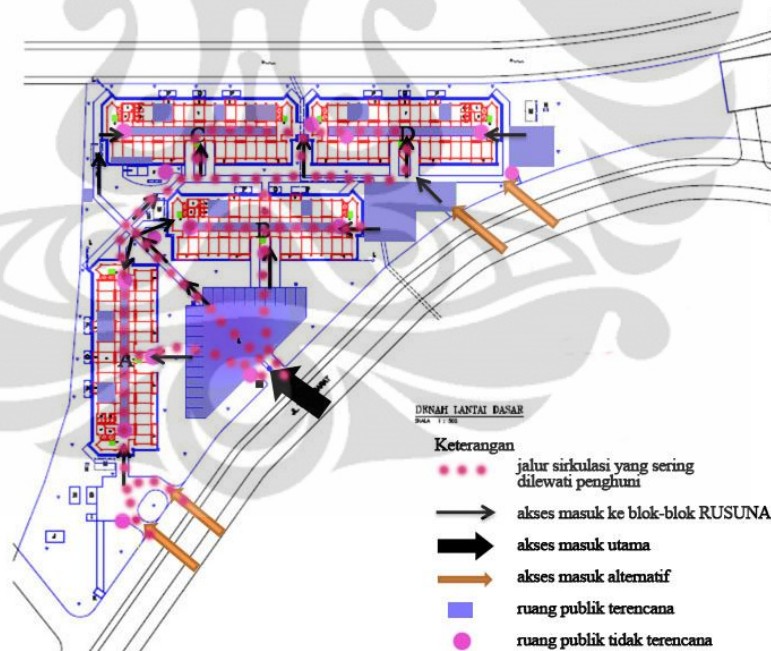
<sup>29</sup> Aktivitas masyarakat demokratis didukung oleh aktivitas berinteraksi sosial yaitu berdialog dan menyuarakan aspirasi. Lihat penjelasan mengenai demokrasi dalam sistem sosial pada subbab 2.1.2 hal. 7.

Tabel 3.4 Kesimpulan analisis organisasi ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat menurut teori Goodsell. (sambungan)

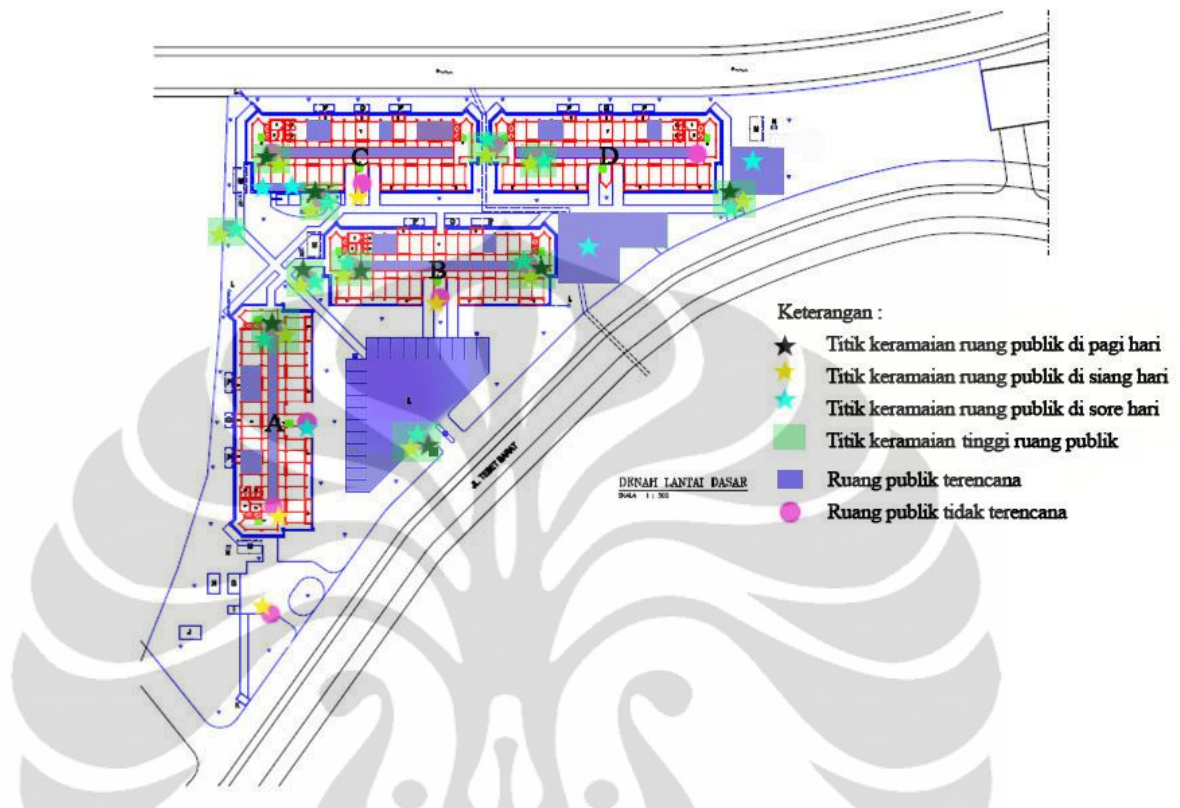
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>
Batas teritorial secara fisik sederhana dengan menggunakan elemen interior kursi. Rasa kepemilikan golongan tertentu pada ruang publik terjadi di beberapa ruang publik yang memiliki pola penyebaran merata di setiap blok. Sehingga dengan ini terjadi pemisahan-pemisahan komunitas di ruang publik yang menyebar tersebut. Sedangkan ruang publik yang terpusat di perpotongan jalan berpotensi sebagai ruang publik yang demokratis karena beragam penghuni bisa mudah mengakses ruang publik tersebut dan bisa saling berinteraksi satu sama lain.

### 3.1.6 Potensi Organisasi Ruang Publik RUSUNA Harum Tebet Barat yang Demokratis

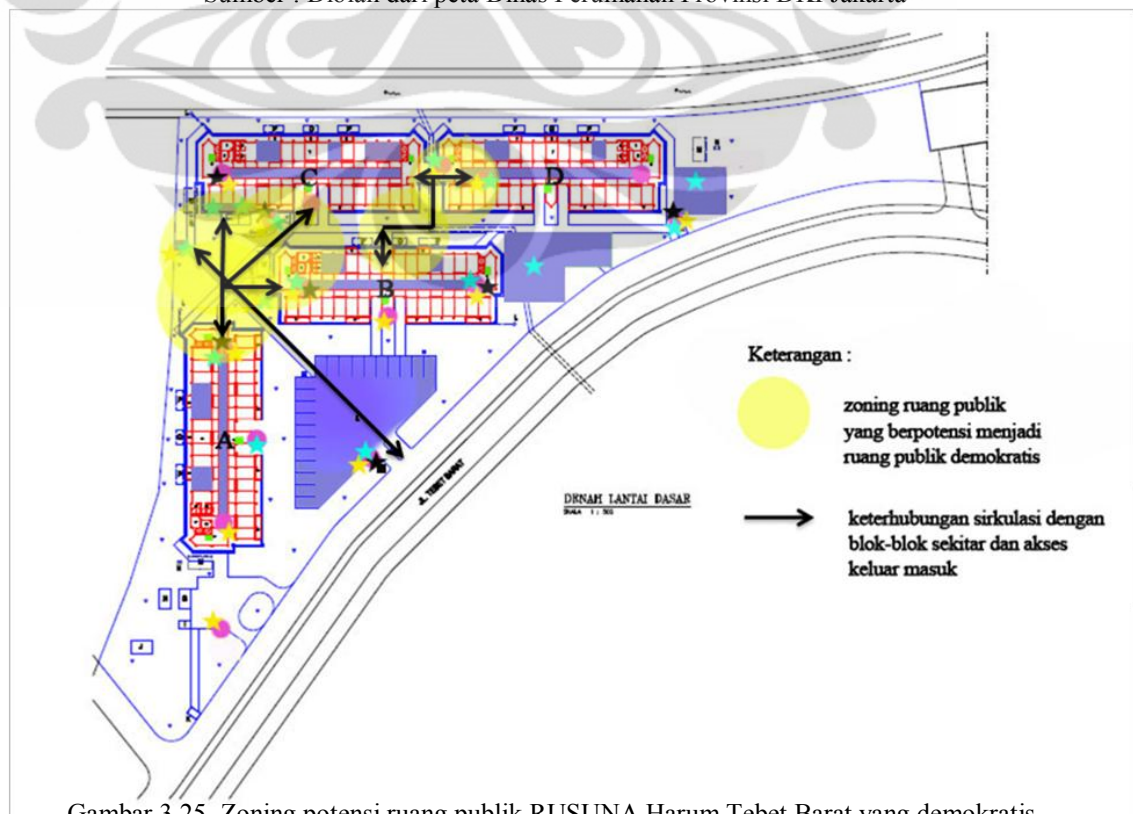
Dengan menggali potensi fisik ruang publik yang demokratis maka akan memaksimalkan peran dalam pengembangan sikap demokratis. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu, jalur-jalur sirkulasi yang biasa dilewati penghuni (bagian dari aksesibilitas) dan juga titik-titik keramaian penghuni di ruang publik (pola aktivitas penghuni).



Gambar 3.23. Sirkulasi penghuni dan akses-akses masuk ke RUSUNA Harum Tebet Barat  
Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.24. Titik-titik keramaian ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat  
 Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.25. Zoning potensi ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat yang demokratis  
 Sumber : Diolah dari peta Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta

Titik keramaian tinggi ruang publik (Lihat gambar 3.25) jika dikaitkan dengan sirkulasi yang sering dilewati penghuni (Lihat gambar 3.24), maka akan menciptakan ruang publik yang demokratis didukung dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dan organisasi ruang publik tersebut. Terdapat 2 area yang berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis, yaitu

1. Area sekitar perpotongan jalan antara blok 1-B, 1-C, dan 1-D. Jalannya berpotongan dengan sumbu penghubung akses masuk blok 1-B, 1-C, dan 1-D. Sangat strategis dan memiliki aksesibilitas yang tinggi karena diapit oleh 3 blok tersebut. Sehingga titik keramaian berkumpul di area tersebut. Area ini juga tidak hanya memiliki aksesibilitas tinggi secara horizontal namun juga vertikal karena akses masuk berada dekat dengan tangga.
2. Area sekitar perpotongan jalan antara blok 1-A, 1-B, dan 1-C. Perpotongan ini berada di sumbu yang sama dengan akses masuk pintu utama sehingga konektivitas nya cukup besar untuk mengarahkan massa ke area ini. Area ini memiliki aksesibilitas yang tinggi karena di apit oleh 3 blok. Dimana sangat terbuka untuk bisa diakses dari mana saja dan penghuni dari blok manapun.

Kedua area tersebut memiliki aksesibilitas yang tinggi dan lokasinya yang strategis sehingga memicu kepemilikan ruang bersama yang bisa diakses penghuni blok manapun. Jika fisik dan fungsi mendukung maka kedua area tersebut berpotensi untuk penanaman nilai-nilai demokrasi pada pengguna ruang publik. Dengan ini, maka perlahan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme tertanam dalam fisik ruang publik kemudian terinternalisasi di keseharian masyarakatnya. Hal ini akan menimbulkan keleluasaan penghuni untuk bisa melakukan aktivitas masyarakat demokratis yaitu berinteraksi sosial sehingga mereka bisa saling berdialog dan menyuarakan aspirasi mereka pada sesama penghuni RUSUNA.

## 3.2 RUSUNA Bidaracina

### 3.2.1. Deskripsi Umum RUSUNA Bidaracina



Gambar 3.26. Kondisi Umum RUSUNA Bidaracina  
Sumber : dok.pribadi

RUSUNA Bidaracina yang terletak di Jatinegara, Jakarta Timur ini memiliki lahan seluas 2,33 ha yang terdiri dari 7 blok, dimana masing-masing blok terdiri dari 5 lantai. Mulai dibangun pada tahun 1994 dan selesai dibangun pada tahun 1996. RUSUNA ini memiliki 688 unit yang terdiri dari satu tipe, yaitu tipe 18. RUSUNA ini pada mulanya diperuntukan bagi warga yang tinggal di daerah aliran sungai yang terkena proyek pelebaran sungai Ciliwung.

### 3.2.2. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Penghuni RUSUNA Bidaracina

RUSUNA ini mayoritas dihuni oleh masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Namun sekarang ini penduduk asli yang menempati RUSUNA ini hanya 20% saja dan 80% lainnya adalah pihak kedua yang membeli atau menyewa RUSUNA tersebut.<sup>30</sup> Penghuni asli melihatnya sebagai peluang ekonomi dan lebih memilih untuk mencari rumah yang lebih murah lagi.

20% penghuni asli memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi dimana mereka sering bersosialisasi satu sama lain namun mereka yang berstatus penyewa cenderung jarang bersosialisasi karena banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan memilih untuk beristirahat di unitnya masing-masing.

RUSUNA ini secara latar belakang budaya dihuni oleh suku betawi, irian, aceh, madura. Untuk penghuni yang bersuku madura banyak menimbulkan kasus yang mengganggu ketenangan penghuni RUSUNA. Karena mereka pernah minum-minuman keras dan disikapi oleh penghuni lain dengan kekerasan pula sehingga

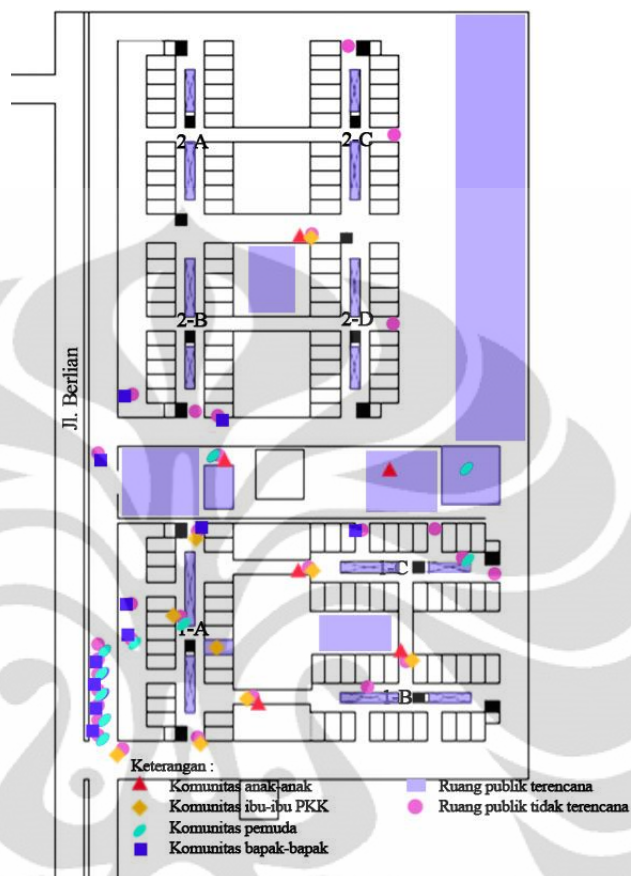
<sup>30</sup> Wawancara dengan Pak Imam, Sekretaris Umum RW RUSUNA Bidaracina, 2 Mei 2011

pernah terjadi keributan. Hal ini disikapi oleh pengurus RW dengan mengeluarkan penghuni tersebut dari RUSUNA.

Secara kegiatan dalam sosialisasi antar penghuni, tercipta beberapa komunitas sosial di RUSUNA ini seperti yang terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Komunitas sosial di RUSUNA Bidaracina  
Sumber : Hasil observasi dan wawancara di RUSUNA Bidaracina, 2 Mei 2011

No	Jenis Komunitas	Waktu kumpul	Kegiatan bersama komunitas	Tempat komunitas biasa berkumpul
1	Komunitas anak-anak	Siang, sore	Bermain	Taman bermain anak-anak, koridor lantai dasar, ruang publik tidak terencana dekat lapangan parkir
2	Komunitas ibu-ibu PKK	Pagi,siang, dan sore	aktivitas Posyandu sebulan sekali, Jumantik, arisan sebulan sekali, dan Paut (Pendidikan Anak Usia Dini), mengobrol	Ruang publik tidak terencana di koridor dan ruang serbaguna
3	Komunitas pemuda	malam	Mengobrol, bernyanyi dan bermain gitar bersama, mengorganisir kegiatan kerohanian	Mesjid, ruang publik tidak terencana di koridor, ruang publik tidak terencana dekat lapangan parkir
4	Komunitas bapak-bapak	Siang, sore, dan malam	Mengobrol	Ruang publik tidak terencana di koridor dan dekat akses masuk



Gambar 3.27. Persebaran komunitas di ruang publik RUSUNA Bidaracina  
 Sumber : dok.pribadi hasil survei RUSUNA Bidaracina

Komunitas jarang terlihat bercampur sehingga bisa menimbulkan jarak antar komunitas. Hal ini diminimalisir oleh pengurus RW dengan mengadakan acara bersama.

### 3.2.3. Pandangan Beberapa Penghuni RUSUNA Bidaracina Mengenai Demokrasi dan Implementasinya

Pandangan beberapa penghuni mengenai demokrasi penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara 5 penghuni RUSUNA Bidaracina.<sup>31</sup> Sekretaris umum RW RUSUNA Bidaracina memandang demokrasi melalui partisipasi masyarakat dalam pemilu. Beliau menyatakan peran serta masyarakat dalam demokrasi bisa melalui keikutsertaan penghuni RUSUNA dalam kampanye pemilihan pengurus RW.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Pak Imam (Sekretaris Umum RW), Ketua ibu-ibu PKK, dan 3 penghuni RUSUNA Bidaracina, 2 Mei 2011, 14 Mei 2011.

RW RUSUNA Bidaracina itu sendiri bergabung dengan kepengurusan PPRS sehingga kerjanya bisa lebih sinergis satu sama lain. Sedangkan Ketua ibu-ibu PKK memandang demokrasi sebagai suatu kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Beliau menyatakan dalam kesehariannya penghuni RUSUNA masih banyak melenceng dari nilai-nilai demokrasi. Dua penghuni lainnya kurang bisa menjelaskan apa itu demokrasi. Penghuni masih banyak yang belum mengetahui pengertian demokrasi, namun secara penerapan penghuni biasa mengadakan voting pemilihan ketua RW atau RT sehingga penanaman nilai demokrasi yang ada baru sekedar tataran politik saja.

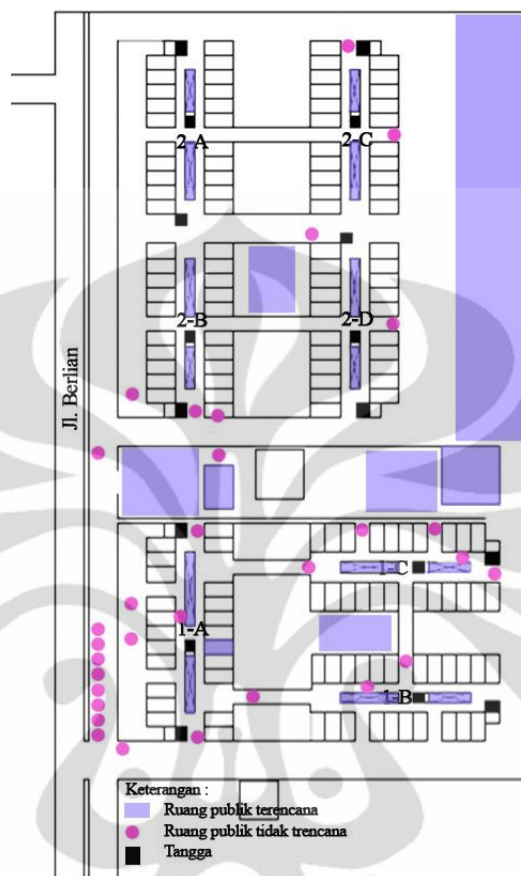
Pemahaman seharusnya sejalan dengan implementasi. Hal ini berimplikasi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di RUSUNA Bidaracina dimana banyak hal yang mencerminkan keminiman nilai demokrasi pada penghuninya. Jarak antar suku masih terjadi di RUSUNA ini sehingga menimbulkan konflik sosial antar penghuni. Beberapa penghuni juga mengeluhkan beberapa masalah *intern* antar tetangga yang mengganggu kenyamanan penghuni lainnya.

Secara konsep penghuni belum memegang betul nilai-nilai demokrasi sehingga banyak terjadi konflik sosial. Program-program dari organisasi RUSUNA belum banyak membawa perubahan bagi penghuninya.

#### **3.2.4. Ruang Publik di RUSUNA Bidaracina**

Ruang publik RUSUNA ini terdiri dari ruang publik terencana dan tidak terencana. Berikut adalah distribusi ruang publik terencana dan tidak terencana yang ada di RUSUNA Bidaracina.





Gambar 3.28. Distribusi ruang publik RUSUNA Bidaracina  
Sumber : dok.pribadi hasil survei RUSUNA Bidaracina

### 3.2.4.1 Ruang Publik yang Terencana RUSUNA Bidaracina

Fasilitas ruang publik sebagai ruang interaksi sosial berada terpusat di lantai dasar. Secara aksesibilitas mudah dijangkau oleh semua penghuni karena semua penghuni pasti melewati lantai dasar. Namun di lain pihak hal ini kurang menguntungkan bagi penghuni di lantai atas terutama lantai 4. Hal ini akan membuat penghuni tersebut malas turun ke lantai dasar.



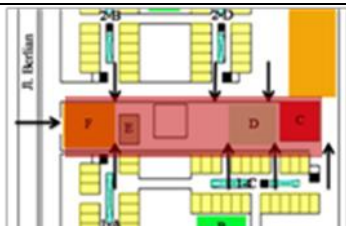
Gambar 3.29. Distribusi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina

Sumber : dok.pribadi hasil survei RUSUNA Bidaracina

Ruang publik akan dianalisis menurut teori Goodsell mengenai dimensi fisik yang bisa menciptakan ruang publik yang demokratis.<sup>32</sup> Ada 3 organisasi ruang publik terencana pada RUSUNA yang akan dianalisis. (Lihat tabel 3.2)




Tabel 3.6. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell

Sumber : Diolah dari hasil survei RUSUNA Bidaracina, Mei 2011

Dimensi Keterbukaan ( <i>openness</i> )			
No	Organisasi Ruang Publik Terencana	Aksesibilitas	Fungsi ruang
1	 <p>Gambar 3.30 Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina 1 Sumber : dok.pribadi</p>	<p>Ada 1 akses masuk alternatif dan 7 akses masuk dari blok RUSUNA.</p> <p>Alur sirkulasi</p>	<p>Ruang publik ini dijadikan sarana parkir mobil dan motor, sarana beribadah (mesjid), dan taman bermain anak-anak. Area parkir terkadang digunakan untuk kampanye dan pemilihan ketua RW.</p>

<sup>32</sup> Lihat penjelasan mengenai kriteria ruang publik yang demokratis, teori Goodsell pada subbab 2.3.2 hal.17.

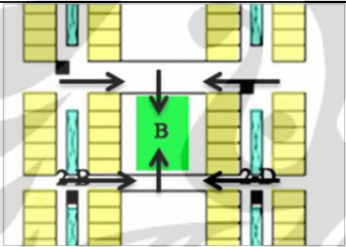

Tabel 3.6. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell. (sambungan)

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>			
<b>No</b>	<b>Organisasi Ruang Publik Terencana</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Fungsi ruang</b>
	Ruang publik yang berwarna merah (■) berada di tengah blok 1 dan blok 2. Pola ruang yang keluar dari organisasi linier RUSUNA memberikan efek yang menonjol untuk dijadikan ruang publik utama pada RUSUNA ini. Berpotensi menjadi ruang dominan pusat secara pola ruang untuk keseluruhan RUSUNA.	dari berbagai blok pun menghubungkan secara efektif menuju ruang publik ini. Ruang ini memiliki aksesibilitas yang sangat tinggi	 <p>Gambar 3.31. Sarana parkir Sumber : dok.pribadi</p>  <p>Gambar 3.32. Taman bermain anak-anak Sumber : dok.pribadi</p>  <p>Gambar 3.33. Masjid dan aula serbaguna Sumber :dok. pribadi</p>
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>			
Batasan fisik teritorial ruang publik ini adalah 2 blok besar RUSUNA yang mengelilingi ruang publik ini dan jalan yang mengitarinya. Karena dibatasi oleh 2 blok besar maka menandakan ruang publik ini berpotensi menjadi milik bersama kedua penghuni blok.			
<b>Kesimpulan awal</b>			
Organisasi ruang seperti ini sangat strategis karena letaknya yang berada di tengah RUSUNA dengan aksesibilitas yang tinggi berpotensi untuk menarik simpul masa lebih. Sangat berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis. Secara fungsi ruang sudah cukup mendukung interaksi sosial anak-anak karena terdapat taman bermain-main. Masjid cukup ramai digunakan sebagai ruang formal acara-acara keislaman atau pernikahan. Sepertiga lahan digunakan sebagai tempat parkir sangat disayangkan karena ruang publik ini sangat potensial untuk bisa menjadi ruang publik yang demokratis. Namun area parkir terkadang digunakan untuk kampanye dan pemilihan ketua RW. Aktivitas yang terjadi disana sejalan dengan aktivitas masyarakat demokratis yang suka menyuarakan aspirasinya dan melakukan pengambilan keputusan bersama.			

Tabel 3.6. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell. (sambungan)

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>			
<b>No</b>	<b>Organisasi Ruang Publik Terencana</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Fungsi ruang</b>
2	 <p>Gambar 3.34. Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina 2 Sumber : dok.pribadi</p> <p>Merupakan bagian dari organisasi linier yang berada di tengah organisasi linier. Dimana area biru (  ) yang diapit oleh organisasi linier dan sirkulasi jalan sangat berpotensi memiliki fungsi berbeda dari sekitarnya yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik.</p>	<p>Area biru (  ) cukup strategis dimana bisa diakses dari 4 akses masuk dan juga 3 tangga sehingga menghubungkan dengan lantai di atasnya. Memiliki aksesibilitas tinggi di dalam blok secara horizontal dan vertikal.</p>	<p>Area biru (  ) merupakan ruang publik sebagai ruang interaksi sosial. Sebagai ruang untuk berdialog dan menyuarakan aspirasi mereka kepada sesama penghuni.</p>  <p>Gambar 3.35. Ruang publik sebagai ruang interaksi sosial di koridor lantai dasar Sumber :dok. pribadi</p>
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>			
<p>Batasan fisik teritorial ruang publik ini adalah jalan sekeliling ruang publik di koridor. Hal ini membuat aksesibilitasnya tinggi sehingga mudah diakses penghuni RUSUNA darimana saja karena dilewati jalan koridor. Akan meminimalisir klaim kepemilikan namun karena berada di tiap blok maka mungkin terjadi klaim kepemilikan di masing-masing blok.</p>			

Tabel 3.6. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell.  
(sambungan)

<b>Kesimpulan awal</b>			
<p>Organisasi ruang ini cukup strategis sebagai ruang publik yang demokratis mengingat aksesibilitas cukup tinggi dan berada di tengah koridor sehingga mudah dijangkau dari sudut mana pun. Namun sangat disayangkan perilaku penghuni tidak mendukung keberadaan ruang tersebut, karena letak ruang publik berada di bawah void dimana penghuni sering buang air kotor atau sampah ke bawah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan untuk memakai ruang tersebut. Hal ini malah menimbulkan penghuni membuat ruang publik tidak terencana di jalan koridor yang mengganggu fungsi sirkulasi.</p>			
<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>			
<b>No</b>	<b>Organisasi Ruang Publik Terencana</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Fungsi ruang</b>
3	 <p>Gambar 3.36. Organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina 3 Sumber : dok.pribadi</p> <p>Berada di antara penghubung organisasi linier. Ruang publik B berada di antara organisasi linier seperti ruang penghubung antar kedua organisasi linier. Ruang ini berpotensi untuk menjadi ruang publik yang cukup menonjol dalam lingkup 1 blok. Letaknya yang berada di antara 4 sub blok ini menjadikan ruang ini berpotensi sebagai pemersatu antar sub blok.</p>	<p>Terdiri dari 4 akses masuk dimana bisa diakses oleh 4 sub blok. Memiliki aksesibilitas yang tinggi dalam lingkup 1 blok yang memudahkan penghuni sub blok untuk berinteraksi.</p>	<p>Digunakan sebagai sarana olahraga dan bermain anak-anak.</p>  <p>Gambar 3.37. Lapangan badminton RUSUNA Bidaracina Sumber : dok.pribadi</p>

Tabel 3.6. Analisis organisasi ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell. (sambungan)

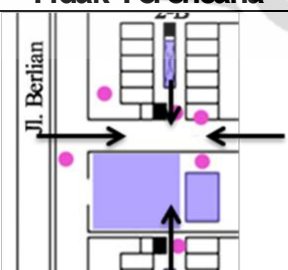

<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>
Batasan fisik teritorial ruang publik ini adalah 2 sub blok dimana berdekatan juga dengan 2 sub blok lainnya. Sehingga berpotensi menimbulkan rasa kepemilikan bersama penghuni 4 sub blok tersebut.
<b>Kesimpulan awal</b>
Organisasi ruang seperti ini berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis dalam lingkup 1 blok. Dimana meletakkannya di tengah blok dan diapit oleh koridor utama sangat memungkinkan penghuni blok tersebut mudah mengaksesnya dari sudut manapun. Namun secara fungsi kurang sesuai dengan potensinya mengingat penghuni jarang bermain badminton sehingga ruang publik ini jarang digunakan. Sesekali digunakan 1 atau 2 orang anak untuk bermain sepeda.

### 3.2.4.2 Ruang Publik Tidak Terencana RUSUNA Bidaracina

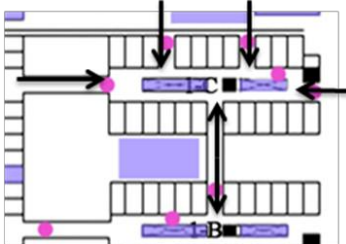
Ruang publik tidak terencana merupakan kreativitas penghuni dalam memenuhi kebutuhan ruang publik mereka sebagai ruang interaksi sosial untuk berdialog dan menyuarakan aspirasi mereka kepada sesama penghuni. Berikut ini analisis 2 organisasi ruang publik tidak terencana menurut teori Goodsell. (Lihat Tabel 3.7)

Tabel 3.7 Analisis organisasi ruang publik tidak terencana RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell



Sumber : Diolah dari hasil survei RUSUNA Bidaracina, 14 Mei 2011

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>			
No	Organisasi Ruang Publik Tidak Terencana	Aksesibilitas	Fungsi ruang
1	 <p>Gambar 3.38. Organisasi ruang publik tidak terencana RUSUNA Bidaracina 1 Sumber : dok.pribadi</p> <p>Ruang publik terencana berada di sekitar akses masuk dan akses masuk blok.</p>	<p>Bisa di akses dari 1 akses alternatif dan 2 akses masuk blok yang menghubungkan ke ruang publik tidak terencana tersebut.</p>	<p>Ruang publik ini dijadikan ruang interaksi sosial penghuni.</p>  <p>Gambar 3.39. Ruang publik tidak terencana di lahan kosong dekat akses masuk alternatif dan akses masuk blok Sumber : dok.pribadi</p>

Tabel 3.7 Analisis organisasi ruang publik tidak terencana  
RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell. (sambungan)

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>			
<b>No</b>	<b>Organisasi Ruang Publik Terencana</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Fungsi ruang</b>
	<p>Pola organisasi ruang ini ada yang keluar dari organisasi linier ada pula yang berada di ujung rangkaian linier. Kumpulan ruang publik tidak terencana ini mengumpul di perpotongan jalan dimana dekat dengan akses masuk alternatif. Letaknya pun satu sumbu dengan pusat ruang publik RUSUNA ini sehingga sangat berpotensi ramai oleh publik.</p>	<p>Bisa di akses dari 1 akses alternatif dan 2 akses masuk blok yang menghubungkan ke ruang publik tidak terencana tersebut.</p>	 <p>Gambar 3.40. Ruang publik tidak terencana di akses masuk Sumber : dok.pribadi</p>
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>			
<p>Beberapa ruang tidak terencana memiliki batas fisik teritorial berupa kursi namun mayoritas tidak ada batasan fisik teritorial pada ruang publik tidak terencana tersebut. Seringnya penghuni menggunakan ruang ini sebagai ruang interaksi sosial membuat ruang tersebut di klaim sebagai ruang interaksi sosial penghuni.</p>			
<b>Kesimpulan awal</b>			
<p>Organisasi ruang dekat dengan akses masuk alternatif dan akses masuk blok menjadi ruang favorit penghuni untuk berinteraksi sosial. Jika ditarik sumbu maka akan ada perpotongan antara sumbu akses masuk blok dengan akses utama/alternatif yang menjadikan ruang tersebut sangat strategis karena mudah diakses dari mana pun. Letaknya pun satu sumbu dengan pusat ruang publik RUSUNA sehingga berpotensi untuk diramaikan penghuni.</p>			
2	 <p>Gambar 3.41. Organisasi ruang publik tidak terencana RUSUNA Bidaracina 2 Sumber : dok.pribadi</p>	<p>Akses masuk blok dan jalan koridor menjadi ruang favorit interaksi sosial penghuni. Berada di jalur</p>	<p>Memiliki fungsi sebagai ruang interaksi sosial.</p>

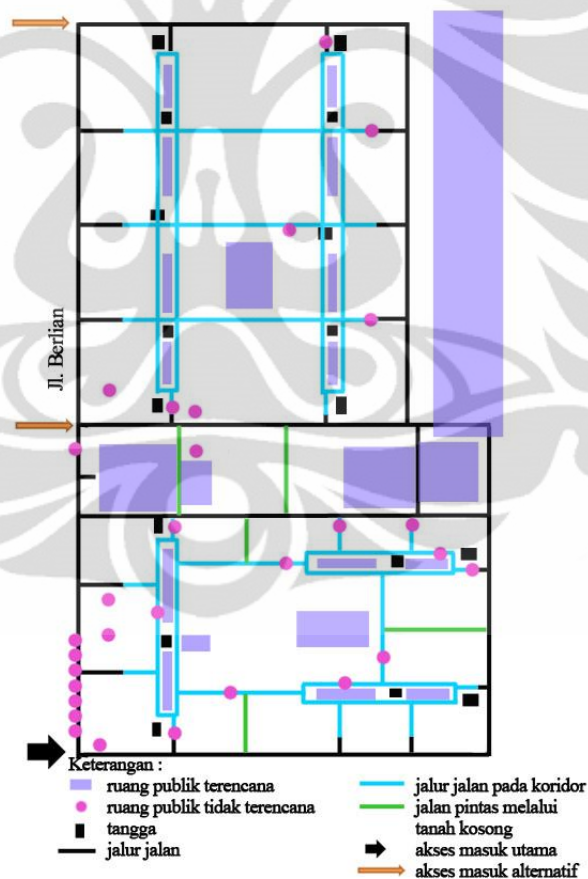
Tabel 3.7 Analisis organisasi ruang publik tidak terencana  
RUSUNA Bidaracina menurut teori Goodsell. (sambungan)

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>			
<b>No</b>	<b>Organisasi Ruang Publik Terencana</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Fungsi ruang</b>
	<p>Berada di akses masuk blok, koridor penghubung sub blok, dan di jalan koridor. Pola persebaran ruang publik tidak terencana yang berada di akses masuk ini mampu memenuhi kebutuhan penghuni akan ruang interaksi sosial namun akan menimbulkan golongan tertentu pada komunitas karena menyebar di tiap blok.</p>	<p>yang aksesibilitasnya tinggi dan sering dilewati penghuni.</p>	 <p>Gambar 3.42. Ruang publik tidak terencana di jalan koridor Sumber :dok. pribadi</p>  <p>Gambar 3.43. Ruang publik tidak terencana di koridor penghubung sub blok Sumber :dok. pribadi</p>
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>			
<p>Batasan fisik teritorial ruang publik ini adalah peletakkan kursi sebagai klaim ruang publik tidak terencana mereka. Dengan ini maka beberapa spot koridor di klaim sebagai ruang interaksi sosial penghuni.</p>			
<b>Kesimpulan awal</b>			
<p>Organisasi ruang ini cukup strategis yaitu berada di akses masuk yang sering dilewati oleh penghuni dan bisa menghubungkan dengan ruang luar blok. Juga berada di dekat tangga sehingga mudah di akses secara vertikal. Adanya pola persebaran seperti ini akan mengelompokkan komunitas tertentu pada ruang publik tersebut sesuai dengan lokasi ruang publiknya. Aksesibilitasnya sangat tinggi untuk menciptakan ruang publik yang demokratis namun sayangnya pola persebaran seperti ini akan memunculkan rasa kepemilikan golongan tertentu sehingga mengganggu kebebasan penghuni untuk mengaksesnya.</p>			



Ruang publik tidak terencana cukup membantu memenuhi kebutuhan akan berinteraksi sosial. Namun ada beberapa ruang publik tidak terencana yang tidak berfungsi lagi karena faktor penghuninya yang jarang keluar untuk berinteraksi sosial. Kursinya dibiarkan begitu saja sehingga sangat mengganggu sirkulasi. Ruang publik tidak terencana yang dibuat oleh masyarakat secara dimensi keterbukaan sangat berpotensi untuk menjadi ruang publik yang demokratis. Namun secara dimensi kepemilikan kurang mendukungnya. Ruang publik tidak terencana ini pun juga mengganggu kenyamanan dan kerapihan ruang karena elemen kursi yang dominan menghambat jalur sirkulasi.

### 3.2.5 Kesimpulan Analisis Ruang Publik RUSUNA Bidaracina



Gambar 3.44. Analisis organisasi ruang publik RUSUNA Bidaracina terkait konfigurasi alur  
Sumber : Diolah dari dok.pribadi

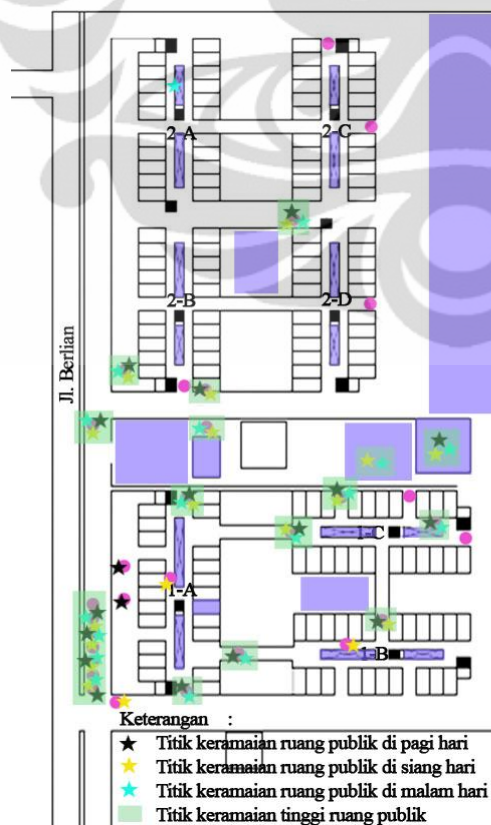
Tabel 3.8 Kesimpulan analisis organisasi ruang publik tidak terencana menurut teori Goodsell  
 Sumber : Diolah dari hasil survei RUSUNA Bidaracina, Mei 2011

<b>Dimensi Keterbukaan (<i>openness</i>)</b>				
<b>No</b>	<b>Jenis Ruang Publik</b>	<b>Organisasi ruang publik</b>	<b>Aksesibilitas</b>	<b>Aktivitas</b>
1	Terencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diapit oleh sirkulasi jalan koridor</li> <li>• Berada di tengah blok dekat dengan akses masuk</li> <li>• Diapit oleh 4 sub blok dan 2 koridor penghubung</li> </ul>	Tinggi  Tinggi  Tinggi	Ruang interaksi sosial (didukung aktivitas masyarakat demokratis) Parkir, anak-anak bermain, beribadah, kampanye dan pemilihan ketua RW (didukung aktivitas masyarakat demokratis) Olah raga badminton (didukung aktivitas masyarakat demokratis)
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>				
Batas teritorial secara fisik sudah jelas menggunakan elemen arsitektur sebagai pembatasnya dan mendukung adanya ruang publik yang demokratis namun beberapa konflik sosial membuat 1 ruang publik yang cukup penting dan potensial sudah tidak berfungsi lagi.				
2	Tidak Terencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada di dekat akses utama/alternatif</li> <li>• Berada di akses masuk dan jalan koridor</li> </ul>	Tinggi  tinggi	Interaksi sosial (didukung aktivitas masyarakat demokratis) Interaksi sosial (didukung aktivitas masyarakat demokratis)
<b>Dimensi kepemilikan (<i>ownership</i>)</b>				
batas teritorial secara fisik sederhana dengan menggunakan elemen interior kursi. Namun karakter dan fungsi ruang publik tidak terencana cukup kuat sehingga berjalan sesuai fungsinya. Pola persebaran ruang ini akan memicu kepemilikan golongan tertentu sehingga mengurangi nilai demokratisnya.				

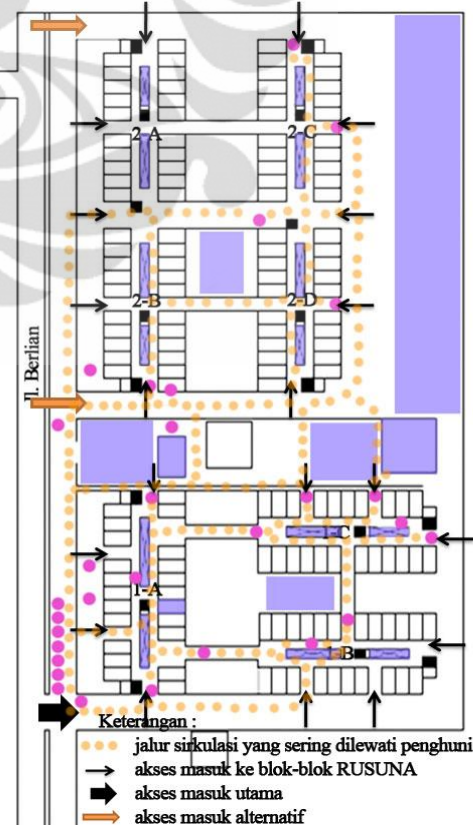
Ruang publik terencana sudah cukup demokratis secara dimensi keterbukaan dan dimensi kepemilikan namun karena tidak didukung oleh perilaku penghuni yang demokratis menyebabkan salah satu ruang tidak berfungsi. Adapun fungsi yang tidak sesuai walaupun memiliki dimensi fisik yang mendukung akan membuat ruang publik tersebut ditinggalkan oleh penghuni. Hal ini dilengkapi oleh ruang publik tidak terencana yang diciptakan oleh penghuni. Secara dimensi keterbukaan sudah mendukung ruang publik yang demokratis namun secara dimensi kepemilikan tidak mendukung, juga cukup mengganggu jalur sirkulasi karena tidak didukung oleh proporsi kursi yang sesuai dengan akses masuk sehingga malah menghambat fungsi sirkulasi. Sehingga nilai demokrasinya berkurang karena bisa mengganggu kenyamanan penghuni lain.

### 3.2.6 Potensi Organisasi Ruang Publik RUSUNA Bidaracina yang Demokratis

Untuk mencari potensi ruang publik yang demokratis maka perlu diperhatikan komponen jalur-jalur sirkulasi yang biasa dilewati penghuni (aksesibilitas) dan juga titik-titik keramaian penghuni di ruang publik (pola aktivitas).



Gambar 3.45. Titik-titik keramaian di ruang publik RUSUNA Bidaracina  
Sumber : Diolah dari dok.pribadi



Gambar 3.46. Sirkulasi penghuni dan akses-akses masuk ke RUSUNA Bidaracina  
Sumber : Diolah dari dok.pribadi

Terdapat 3 area yang berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis, yaitu :  
(Lihat Gambar 3.48)

1. Area X memiliki kekuatan dalam hal aksesibilitas yang tinggi karena dekat dengan akses masuk utama dari RUSUNA Bidaracina. Area ini merupakan perpotongan jalan berlian dengan jalan masuk RUSUNA yang memberi magnet penghuni bahkan orang luar untuk meramaikan area ini. Jalan menjadi ruang favorit penghuni untuk berinteraksi sosial.
2. Area Y memiliki kekuatan aksesibilitas yang tinggi dimana merupakan akses alternatif yang berada di tengah blok RUSUNA. Alur sirkulasi yang kontinu antara blok 1-ruang luar-blok 2 membuat perpotongan-perpotongan 2 sumbu jalan sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi. Merupakan pusat ruang publik sebagai pemersatu blok 1 dan blok 2 dengan letaknya yang berada di tengah RUSUNA dimana memiliki dimensi keterbukaan yang baik sehingga memungkinkan semua penghuni untuk mengakses secara bebas ruang ini. Potensi area ini menyebabkan penghuni RUSUNA menggunakannya untuk interaksi sosial, kampanye dan pemilihan ketua RW, serta menyuarakan aspirasi penghuni. Aktivitas ini sarat dengan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan potensi area sebagai ruang publik yang demokratis.
3. Area Z berada di tengah blok RUSUNA memiliki konfigurasi alur yang kontinu dari akses masuk alternatif, akses masuk blok, dan ruang luar sehingga konektivitas ini menjadikan penghuni bebas mengakses area ini. Letaknya yang berada di pusat blok menjadikannya ramai untuk dikunjungi penghuni.



Gambar 3.47. Zoning potensi ruang publik yang demokratis di RUSUNA Bidaracina  
Sumber : Diolah dari dok.pribadi

Ketiga area ini berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis dimana aksesibilitas yang tinggi, organisasi ruang yang strategis, dan terhubung dengan akses masuk menjadi kunci ruang untuk pengembangan sikap demokratis. Dengan adanya dimensi keterbukaan yang baik ini maka penghuni bisa bebas mengakses ruang publik tersebut sehingga penghuni memiliki hak yang sama dalam mengakses suatu ruang publik. Dengan beragamnya penghuni ruang publik yang mengaksesnya maka akan mendorong untuk mempersatukan keberagaman tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini akan mendukung aktivitas masyarakat demokratis dalam berinteraksi sosial untuk saling berdialog dan menyuarakan aspirasi penghuni, juga sebagai ruang untuk pengambilan keputusan bersama.

### 3.3 Perbandingan Ruang Publik RUSUNA Harum Tebet Barat dan Bidaracina

Kedua RUSUNA ini memiliki kelas sosial ekonomi yang berbeda sehingga penulis ingin membandingkan kondisi ruang publik kedua RUSUNA tersebut. Apakah kelas ekonomi mempengaruhi kondisi ruang publik lebih demokratis atau tidak.

Tabel 3.9. Perbandingan ruang publik RUSUNA Harum Tebet Barat dan RUSUNA Bidaracina  
 Sumber : Diolah dari hasil survei RUSUNA Harum Tebet Barat dan Bidaracina, April-Mei 2011

No	Dimensi Fisik Ruang Publik yang Demokratis	RUSUNA Harum Tebet Barat		RUSUNA Bidaracina	
		Ruang publik terencana	Ruang publik tidak terencana	Ruang publik terencana	Ruang publik tidak terencana
1	Dimensi Keterbukaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi ruang publik</li> <li>• Aksesibilitas</li> <li>• Aktivitas di ruang publik</li> </ul>	Berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis Cukup tinggi kurang didukung aktivitas masyarakat demokratis.	Berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis tinggi didukung aktivitas masyarakat demokratis.	Berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis tinggi didukung aktivitas masyarakat demokratis.	Berpotensi menjadi ruang publik yang demokratis tinggi didukung aktivitas masyarakat demokratis.
2	Dimensi kepemilikan	Fisiknya ada yang sudah mendukung dan ada yang belum mendukung kepemilikan bersama pada ruang publik	Fisiknya kurang mendukung rasa kepemilikan bersama	Fisiknya sebagian besar mendukung kepemilikan bersama pada ruang publik	Fisiknya kurang mendukung rasa kepemilikan bersama
Kesimpulan		Secara fisik sudah mendukung penciptaan ruang publik yang demokratis namun pemilihan aktivitas ruang kurang sesuai dengan aktivitas masyarakat demokratis. Sehingga belum memiliki potensi ruang publik demokratis yang menyeluruh	Secara dimensi keterbukaan sudah mendukung penciptaan ruang publik yang demokratis dengan aktivitas masyarakat demokratis namun fisiknya menimbulkan kepemilikan golongan tertentu. Sehingga belum memiliki potensi ruang publik demokratis yang menyeluruh	Secara fisik dan aktivitasnya sudah mendukung penciptaan ruang publik yang demokratis	Dimensi keterbukaannya sudah mendukung penciptaan ruang publik demokratis dan diisi dengan aktivitas masyarakat demokratis. Namun fisiknya menimbulkan kepemilikan golongan tertentu sehingga belum memiliki potensi ruang publik demokratis yang menyeluruh

Ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina secara fisik yang paling mendukung pembentukan ruang publik yang demokratis. Nilai-nilai demokrasi pada

penghuni RUSUNA Bidaracina masih belum sempurna memang namun aktivitas-aktivitas berdiskusi dan berkumpul bersama membudaya dalam keseharian penghuni RUSUNA Bidaracina. Sehingga ada nilai-nilai demokrasi secara fisik yang ditanamkan pada penghuni RUSUNA. Sangat disayangkan penghuni RUSUNA Tebet Harum Barat yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupan sehari-harinya kurang didukung oleh fisik ruang publik yang demokratis. Sehingga nilai-nilai demokrasi perlu diimbangi secara fisik ruang publiknya maupun sosial penghuninya sehingga tercipta ruang publik yang demokratis.

Sedangkan untuk potensi fisik ruang publik yang demokratis sering ditemukan pada ruang di perpotongan jalan dimana sangat berpotensi bagi semua penghuni untuk bebas mengakses ruang publik tersebut sehingga penghuni dengan keanekaragamannya memiliki hak yang sama untuk menggunakan ruang publik tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi sehingga dalam berinteraksi sosial nilai-nilai demokrasi perlahan akan tertanam dalam diri penghuninya. Dengan potensi ruang publik yang demokratis yang memberikan kenyamanan penghuni untuk melakukan aktivitas masyarakat demokratis yaitu saling berdialog, menyuarakan aspirasi, dan melakukan pengambilan keputusan bersama. Hal ini secara perlahan akan meningkatkan peran ruang publik yang demokratis sebagai upaya mengembangkan sikap demokratis dalam kehidupan sehari-harinya.

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN**

Ruang publik yang demokratis adalah ruang publik yang berpotensi fisik mengembangkan sikap demokratis yang aksesibel untuk semua golongan masyarakat. Ruang publik secara fisik membantu menanamkan 3 prinsip demokrasi yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Nilai-nilai demokrasi seharusnya ditanamkan dalam keseharian masyarakat di ruang publik sehingga sikap masyarakat secara alami berkembang lebih demokratis. Ruang publik di lingkungan rumah tinggal ikut berperan dalam pengembangan sikap demokratis, yang dalam penulisan ini dikhususkan pada ruang publik RUSUNA. Keberadaan fisik ruang publik sangatlah penting untuk mendukung proses pengembangan sikap demokratis selama masyarakat berinteraksi sosial di dalamnya. Hal ini akan mendukung aktivitas masyarakat demokratis dalam saling berdialog, menyuarakan aspirasi, dan melakukan pengambilan keputusan bersama.

Inti dari dimensi keterbukaan adalah aksesibilitas yang tinggi yang merupakan penentu kebebasan dan kemajemukan masyarakat dalam mengakses suatu ruang publik. Sedangkan inti dari dimensi kepemilikan adalah batas teritorial fisik yang mempengaruhi kepemilikan bersama suatu ruang publik. Dimensi keterbukaan dan dimensi kepemilikan ini secara fisik berperan menciptakan ruang publik demokratis sebagai upaya pengembangan sikap demokratis sesuai dengan teori Goodsell (1988); Henaff dan Strong (2001). Kemudian ditambahkan dengan skema Lefebvrian yang dalam menciptakan suatu ruang melihat pada kesatuan fisik, mental, dan sosial. Skema ruang Lefebvre memungkinkan aktor sosial untuk mengerti bagaimana menciptakan ruang publik yang demokratis untuk masyarakatnya. Dengan dipenuhinya kriteria fisik ruang publik yang demokratis maka ruang publik ikut berperan dalam pengembangan sikap demokratis.

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang penulis lakukan, potensi fisik ruang publik yang demokratis sering ditemukan pada ruang di perpotongan jalan yang sangat berpotensi untuk diakses semua golongan penghuni. Hal ini membuat penghuni yang beraneka ragam bebas menggunakan ruang publik tersebut. Perpotongan jalan seringkali menjadi pusat keramaian publik karena lokasinya yang



strategis bisa menyatukan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam fisik ruang publik di sini sangat mendukung pengembangan sikap demokratis sehingga ruang di sekitar perpotongan jalan menjadi daya tarik ruang publik yang demokratis.

Ruang publik terencana RUSUNA Bidaracina secara fisik yang paling mendukung pembentukan ruang publik yang demokratis. Ruang publik ini banyak mendukung aktivitas-aktivitas masyarakat demokratis dalam berinteraksi sosial seperti berdiskusi dan berkumpul bersama penghuni, menyuarakan aspirasi, dan melakukan pengambilan keputusan bersama. Fisik ruang publik ini mendukung penanaman nilai-nilai demokrasi pada penghuni RUSUNA tersebut. Namun ada kalanya masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di kehidupan sehari-harinya kurang didukung oleh fisik ruang publik yang demokratis seperti yang terjadi di RUSUNA Tebet Harum Barat. Nilai-nilai demokrasi sangatlah perlu ditanamkan baik secara fisik ruang publiknya maupun sosial penghuninya sehingga tercipta ruang publik yang demokratis. Ruang publik tidak terencana yang merupakan ekspresi penghuni terhadap ruang publiknya mendukung terciptanya ruang publik yang demokratis. Namun kadangkala menimbulkan rasa kepemilikan pada golongan tertentu sehingga mengurangi nilai demokrasi pada ruang publik tersebut.

Perbedaan kondisi sosial ekonomi penghuni RUSUNA mempengaruhi kadar nilai demokrasi pada penghuninya. Penghuni kedua RUSUNA sama-sama memiliki aktivitas masyarakat demokratis namun kelas sosial ekonomi menengah ke bawah lebih banyak memunculkan konflik sosial dalam penggunaan ruang publik. Secara fisik ruang publik terencana tidak ada pengaruh nyata yang menonjolkan keunggulan demokrasi pada kelas sosial ekonomi tertentu. Namun secara fisik ruang publik tidak terencana kelas sosial ekonomi menengah ke atas lebih mendekati kriteria ruang publik yang demokratis dibandingkan ruang publik tidak terencana kelas sosial ekonomi menengah ke bawah.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Bell, P.A., dkk. (2001). *Environmental Psychology*. USA: Thomson Learning.
- Ching, F.D.K. (2000). *Bentuk, Ruang, dan Tatahan*. Jakarta: Erlangga.
- Jefferson, T. (1987). *Democratic Architecture*. London: E G Bond Ltd.
- Lubis, M. (peny.). (1994). *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rosyada, D., dkk. (2005). *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media.
- Towers, G. (1995). *Building Democracy*. London: UCL Press.

### II. DOKUMEN PEMERINTAH

- Dinas Perumahan. (2008). *Buku Saku Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta.
- Dinas Perumahan. (2000). *Dokumen RUSUNA Harum Tebet Barat*. Dokumen tidak diterbitkan.

### III. WAWANCARA

- Hani, Kepala Koordinator Kebersihan PPRS RUSUNA Harum Tebet Barat. (2011, April 27). Hasil wawancara.
- Imam, Sekretaris Umum RW RUSUNA Bidaracina. (2011, Mei 2). Hasil wawancara.
- Ketua Ibu-ibu PKK RUSUNA Bidaracina. (2011, Mei 4). Hasil wawancara.
- Ketua RT Blok B RUSUNA Harum Tebet Barat. (2011, April 29). Hasil wawancara.
- Tini, Ketua Ibu-Ibu PKK RUSUNA Harum Tebet Barat. (2011, Mei 3). Hasil wawancara.
- 3 Penghuni RUSUNA Bidaracina. (2011, Mei 2; 2011, Mei 14). Hasil wawancara.
- 4 Penghuni RUSUNA Harum Tebet Barat. (2011, April 29; 2011, Mei 3). Hasil wawancara.

### IV. KARYA LAIN DAN KARYA NONCETAK

- Elfira, V. (1997). Pemanfaatan Ruang Bersama di Dalam Bangunan Rumah Susun bagi Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Skripsi tidak diterbitkan.

## V. PUBLIKASI ELEKTRONIK

### Buku Online

- Arendt, H. (1998). *The Human Condition*. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Juni 28, 2011. [http://www.esnips.com/doc/22e73b80-78a9-4705-9ed6-e5442b704516/\(ebook\)%20Hanna%20Arendt%20-%20The%20Human%20Condition](http://www.esnips.com/doc/22e73b80-78a9-4705-9ed6-e5442b704516/(ebook)%20Hanna%20Arendt%20-%20The%20Human%20Condition)
- Geenens, R., dan Tinnevelt, R. (ed.). (2009). *Does Truth Matter? Democracy and Public Space*. Springer Science+Business Media B.V. April 12, 2011. <http://library.nu>
- Henaff, M., dan Strong, T.B. (ed.). (2001). *Publik Space and Democracy*. USA: University of Minnesota Press. Maret 31, 2011. <http://books.google.co.id>
- Pestoff, V.A. (2009). *A Democratic Architecture for The Welfare State*. USA dan Canada: Routledge. Maret 17, 2011. <http://www.avaxhome.com>

### Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Makalah online

- Gustaf, W., Utomo, T.P., dan Fauziah, A., (2011). *Makalah Kewarganegaraan*, Juni 9, 2011. <http://www.gustaf.web.id/2011/01/makalah-uts-pkn.html>
- Haryanti, D.T. (2008). *Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Smpang Lima Semarang*. Juni 9, 2011. [http://eprints.undip.ac.id/17085/1/DINI\\_TRI\\_HARYANTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17085/1/DINI_TRI_HARYANTI.pdf)
- Jenlink, P.M. (2007). *Creating Public Spaces and Practiced Places for Democracy, Discourse, and the Emergence of Civil Society*. Springer Science+Business Media. Maret 30, 2011. <http://www.springerlink.com/content/349427mmux95x674/>
- Krishna, A. *Poverty, Participation, and Democracy*. Cambridge University Press. April 12, 2011. <http://www.thedivineconspiracy.org/Z5257O.pdf>
- Meyer, T., dan Hinchman, L. (2007). *The Theory of Social Democracy*. April 12, 2011. [http://www.dissentmagazine.org/democratiya/article\\_pdfs/d16Thompson.pdf](http://www.dissentmagazine.org/democratiya/article_pdfs/d16Thompson.pdf)
- Parkinson, J. (2006). *Holistic Democracy and Physical Public Space, British Journal of Political Science Conference. London*. Maret 27, 2011. <http://www.pdfqueen.com>
- Subkhan, M. (2008). *Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Cengkareng Jakarta Barat*. Semarang. Februari 21, 2011. <http://eprints.undip.ac.id>

Talen, E. (2000). *The Problem with Community Planning*, *Journal of Planning Literature*. Sage: Illinois. April 19, 2011. <http://www.4shared.com>

Walker, B. (2003). *Another Kind of Science: Christopher Alexander on Democratic Theory and the Built Environment*, *Canadian Journal of Political Science*. Los Angeles. Februari 27, 2011. <http://www.pdfqueen.com>

Wihardi, W. (2010). *Tesis Tipologi Kesiediaan Masyarakat Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi Untuk Tinggal di Rumah Susun*. Semarang. Juni 9, 2011. [http://eprints.undip.ac.id/23663/1/WELLY\\_WIHARDI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23663/1/WELLY_WIHARDI.pdf)

#### **Artikel online**

Bratton, M. (2006). *Afrobarometer Working Papers : Poor People and Democratic Citizenship in Africa*. South Africa: Afrobarometer. April 12, 2011. <http://www.afrobarometer.org>

Greenberg, A. (2006). *Architecture of Democracy*. New York. Februari 28, 2011. [http://www.allacademic.com/meta/p21100\\_index.html](http://www.allacademic.com/meta/p21100_index.html)

Quesenbery, W. (2004). *The Politics of Design*. Maret 8, 2011. <http://www.pdfqueen.com>

Ratih, I. (2005). *Efektivitas Ruang Publik di Rumah Susun: Kajian Perilaku Penghuni Rusun*. Bandung. Februari 21, 2011. <http://www.ar.itb.ac.id/wdp>

Syamsura, D. Ary A. *Ruang Publik bagi Publik*. Juni 9, 2011. [http://forumarsitekbataam.blogspot.com/2008\\_02\\_10\\_archive.html](http://forumarsitekbataam.blogspot.com/2008_02_10_archive.html)

#### **Website Lainnya**

<http://ci.corsicana.tx.us>

[http://id.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen\\_Habermas](http://id.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas)

<http://matanews.com>

<http://pps.org>

<http://tacugama.wildlifedirect.org>

<http://underworld-shop.com>

<http://www.architectmagazine.com/architecture/architecture-of-democracy.aspx>

<http://www.fkh.unair.ac.id/materi/.../DEMOKRASI%20INDONESIA%201.ppt>